



**ANALISIS KETIMPANGAN DAERAH UTARA DAN  
SELATAN PROVINSI BALI TAHUN 2011-2018**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Mohammad Gusti Fawaid**  
**160810101226**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
TAHUN 2021**



**ANALISIS KETIMPANGAN DAERAH UTARA DAN  
SELATAN PROVINSI BALI TAHUN 2011-2018**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar sarjana ekonomi

**Oleh**

**Mohammad Gusti Fawaid**  
**160810101226**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
TAHUN 2021**

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur kepada Allah, skripsi saya persembahkan untuk :

1. Bapakku Soedarsono dan Ibuku Sumiyati yang tersayang dan Kakak saya Sastra dan Yuman, Terima kasih atas dukungan dan pengorbanan yang telah mengiringi perjalanku selama ini
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang tercinta, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh keiklasan dan kesabaran;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

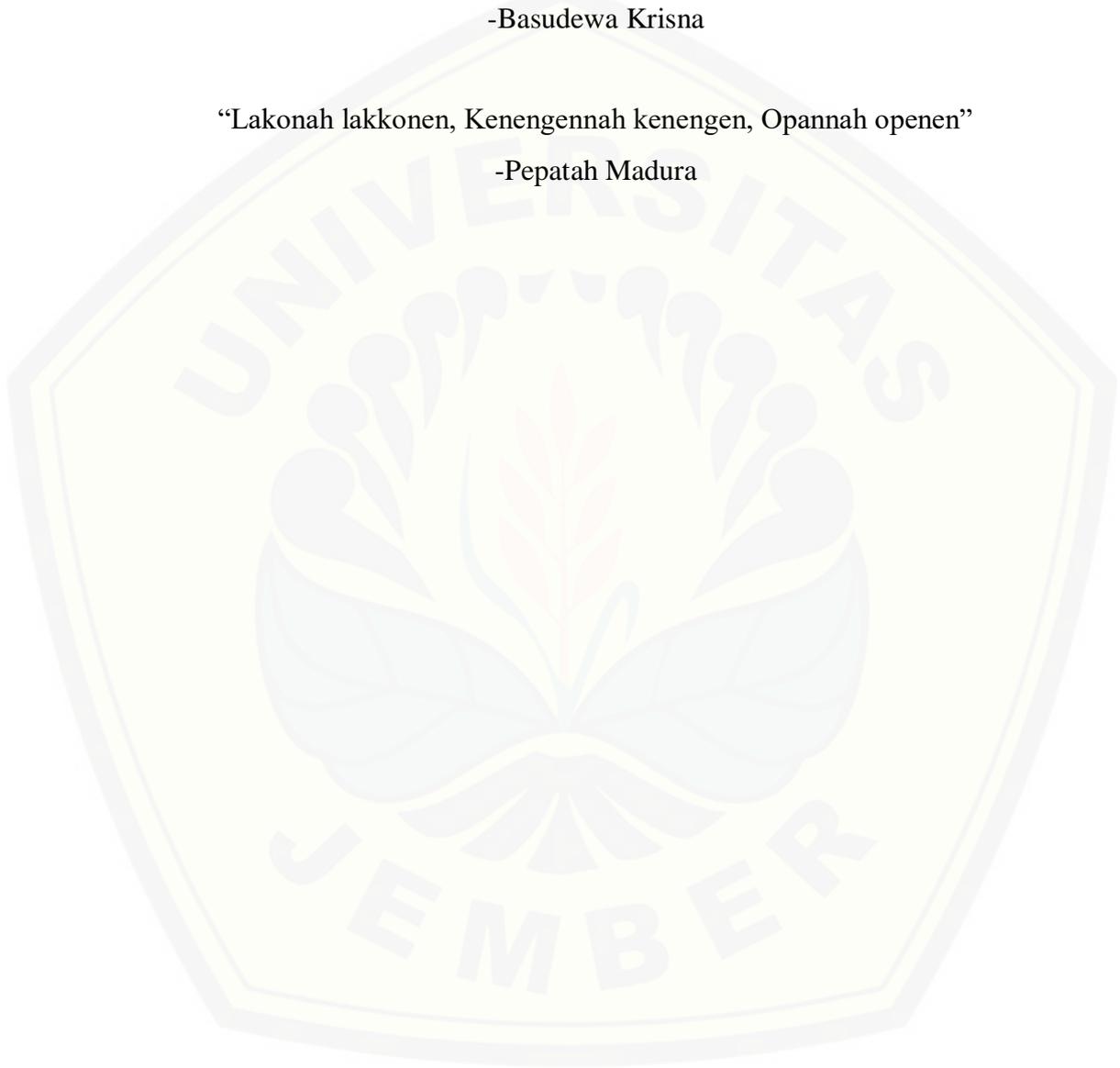
**MOTTO**

“Jangan mencoba mengetahui masa depan, lakukanlah yang terbaik untuk masa sekarang. Jika kita meramalkan masa depan hanya ketidakpastian yang tidak jelaslah yang kita dapatkan”

-Basudewa Krisna

“Lakonah lakkonen, Kenengennah kenengen, Opannah openen”

-Pepatah Madura



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Gusti Fawaid

Nim : 160810101226

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Ketimpangan Daerah Utara dan Selatan Provinsi Bali Tahun 2011-2018**” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2020

Yang menyatakan,

Mohammad Gusti Fawaid

Nim. 160810101226

**SKRIPSI**

**ANALISI KETIMPANGAN DAERAH UTARA DAN SELATAN PROVINSI  
BALI TAHUN 2011-2018**

Oleh

Mohammad Gusti Fawaid

Nim. 160810101226

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Dr.Duwi Yunitasari, S.E., M.E.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Agus Luthfi, M.Si.

**TANDA PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Ketimpangan Daerah Utara dan Selatan  
Provinsi Bali Tahun 2011-2018  
Nama Mahasiswa : Mohammad Gusti Fawaid  
NIM : 160810101226  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Regional  
Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E  
NIP. 197806162003122001

Dr. Agus Luthfi, M.Si  
NIP. 196505221990021001

Koordinator Program Studi

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E, M.P  
NIP. 19720713 199903 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi

### **ANALISIS KETIMPANGAN DAERAH UTARA DAN SELATAN PROVINSI BALI TAHUN 2011-2018**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Mohammad Gusti Fawaid  
NIM : 160810101226  
Progam Studi : Ekonomi Pembangunan

Yang telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

#### Susunan Panitia Penguji :

Ketua : Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E, M.P. (.....)  
NIP. 197207131999031001

Sekretaris : Dr. Moh. Adenan, M.M. (.....)  
NIP. 196610311992031001

Anggota : Aisah Jumiati, S.E., M.P. (.....)  
NIP. 196809261994032002



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakutas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Prof. Dr. Istifadah, M.Si.  
NIP. 196610201999002 2 0011

ANALISIS KETIMPANGAN DAERAH UTARA DAN SELATAN PROVINSI  
BALI TAHUN 2011-2018

**Mohammad Gusti Fawaid**

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Jember

**ABSTRAK**

Ketimpangan merupakan permasalahan pembangunan yang belum dapat dihapuskan di negara berkembang, tak terkecuali Indonesia, negara yang berbentuk kepulauan yang dimana terdapat perbedaan karakteristik antar wilayahnya. Provinsi Bali merupakan salah satu contoh wilayah yang memiliki ketidakmerataan antara daerah utara dan selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan daerah utara dan selatan tahun 2011-2018, menganalisis secara parsial pengaruh tenaga kerja, penanaman modal, belanja modal dan belanja fungsi pariwisata terhadap ketimpangan daerah di Bali utara dan Bali selatan tahun 2011-2018. Penelitian ini menggunakan data skunder yang berbentuk data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat ketimpangan wilayah antar daerah utara dan selatan Provinsi Bali tahun 2011-2018, yang ditunjukkan dengan nilai indeks Williamson sebesar 0.1268 untuk daerah utara Bali dan untuk daerah selatan sebesar 0.1110, di daerah utara belanja modal dan belanja fungsi pariwisata mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan daerah sedangkan tenaga kerja dan penanaman modal tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan. Di daerah selatan, tenaga kerja dan belanja modal mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan, sedangkan penanaman modal dan belanja fungsi pariwisata tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan.

**Kata Kunci:** Daerah Utara Bali, Daerah Selatan Bali, Ketimpangan Wilayah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Belanja Modal, Belanja Fungsi Pariwisata

**ANALYSIS OF INEQUALITY IN NORTH AND SOUTH REGIONS OF  
BALI PROVINCE, 2011-2018**

**Mohammad Gusti Fawaid**

Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and  
Business, Jember University

**ABSTRACT**

Inequality is a development problem that cannot be removed in developing countries, including Indonesia, an archipelagic country where there are differences in characteristics between regions. Bali Province is an example of a region that has inequality between the north and south. This study aims to determine the level of inequality in the northern and southern regions in 2011-2018, partially analyzing the influence of labor, investment, capital expenditure and tourism function expenditures on regional inequality in northern Bali and southern Bali in 2011-2018. This study uses secondary data in the form of panel data obtained from the Badan Pusat Statistika (BPS) and Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk).

The result of this study found that there are still regional imbalances between the northern and southern regions of Bali Province in 2011-2018, which is shown by the Williamson index 0.1268 for the northern area of Bali and 0.1110 for the southern area. In the northern regions, capital expenditure and functional expenditure have an influence on regional inequality, while labor and investment have no effect on inequality. In the south, labor and capital spending have an effect on inequality, while investment and regional spending have no effect on inequality.

**Keywords:** North Bali Region, South Bali Region, Regional Inequality, Labor, Investment, Capital Expenditures, Tourism Function Spending

## RINGKASAN

**Analisis Ketimpangan Daerah Utara dan Selatan Bali Tahun 2011-2018;**  
Mohammad Gusti Fawaid, 160810101226; 2020; halaman; Program Studi  
Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Ketimpangan merupakan masalah dan juga tantangan bagi setiap pembangunan di suatu negara, di Provinsi Bali ketimpangan antar daerah utara dan selatan adalah isu utama yang selalu di bicarakan, pembangunan di Bali selalu dikaitkan dengan isu ketimpangan antar daerah utara dan selatan. Daerah utara Bali meliputi Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung, sedangkan Daerah Selatan dikenal dengan kawasan metropolitan SARBAGITA yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan antara Daerah Utara dan Selatan, yang ditunjukkan dengan nilai indeks Williamson dari tahun 2011-2018 sebesar 0.1268 untuk Daerah Utara dan 0.1110 untuk Daerah Selatan, ketimpangan Daerah Utara cenderung lebih besar dikarenakan pusat perekonomian berada di Daerah Selatan, sebagian penduduk Provinsi Bali bermukim di Daerah Selatan, infrastruktur juga lebih baik daripada di Utara, dan sebagainya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah kesenjangan antara Daerah Utara dan Daerah Selatan saat ini cenderung menurun ataukah justru semakin melebar, dan menganalisis pengaruh variabel tenaga kerja, penanaman modal, belanja modal dan belanja fungsi pariwisata terhadap ketimpangan, baik di Daerah Utara dan Selatan Provinsi Bali.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah secara teoritis muncul di dalam teori Neo-Klasik. Di dalam teori Neo-Klasik disebutkan adanya sebuah prediksi hubungan skala perekonomian dengan derajat ketimpangan, hipotesa ini kemudian dikenal sebagai hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal,2008:105). Menurut teori Kumulatif Kausatif Myrdal bahwa ketimpangan Regional disebabkan karena

kuatnya *backwash effect* dan lemahnya *spread effect* (Jhingan,2012:212). Seperti Myrdal, dalam hubungan dengan penyebaran dampak pertumbuhan kepada wilayah sekitarnya, dan juga Albert Hirschman memperkenalkan istilah *trickling down effect* atau dampak tetesan ke bawah (Adisasmita, 2005:65). ketimpangan antarwilayah terjadi karena wilayah maju tidak mampu menyebarkan pertumbuhan ke wilayah sekitarnya.

Ketimpangan dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks Williamson. Analisis regresi data panel dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji pengaruh tenaga kerja, penanaman modal, belanja modal dan belanja fungsi pariwisata terhadap ketimpangan wilayah, baik di utara maupun selatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa selama tahun 2011-2018, masih terjadi ketimpangan di Daerah Utara maupun selatan yang dibuktikan dengan hasil perhitungan Indeks Williamson sebesar 0.1268 untuk Daerah Utara dan 0.1110 untuk Daerah Selatan.

Berdasarkan hasil regresi, model yang tepat untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di daerah utara adalah model *fixed effect*. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa belanja modal dan belanja fungsi pariwisata mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Utara Provinsi Bali, yang ditunjukkan dengan nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel probabilitas statistik kurang dari taraf signifikansi ( $\alpha= 5\%$ ), belanja modal mempunyai hubungan yang positif terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Utara, belanja modal mempunyai hubungan negatif terhadap ketimpangan. sementara itu tenaga kerja dan penanaman modal tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Utara Provinsi Bali.

Model yang tepat untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Daerah Selatan adalah model *fixed effect*. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa tenaga kerja dan belanja modal mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Selatan Provinsi Bali, yang ditunjukkan dengan nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel probabilitas statistik kurang dari taraf signifikansi ( $\alpha= 5\%$ ), tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Selatan dan belanja modal mempunyai

hubungan yang negatif terhadap ketimpangan, sementara itu penanaman modal dan belanja fungsi pariwisata tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Daerah selatan Provinsi Bali.



## PRAKATA

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Ketimpangan Daerah Utara dan Selatan Provinsi Bali Tahun 2011-2018 ” Skripsi ini disusun dimana untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

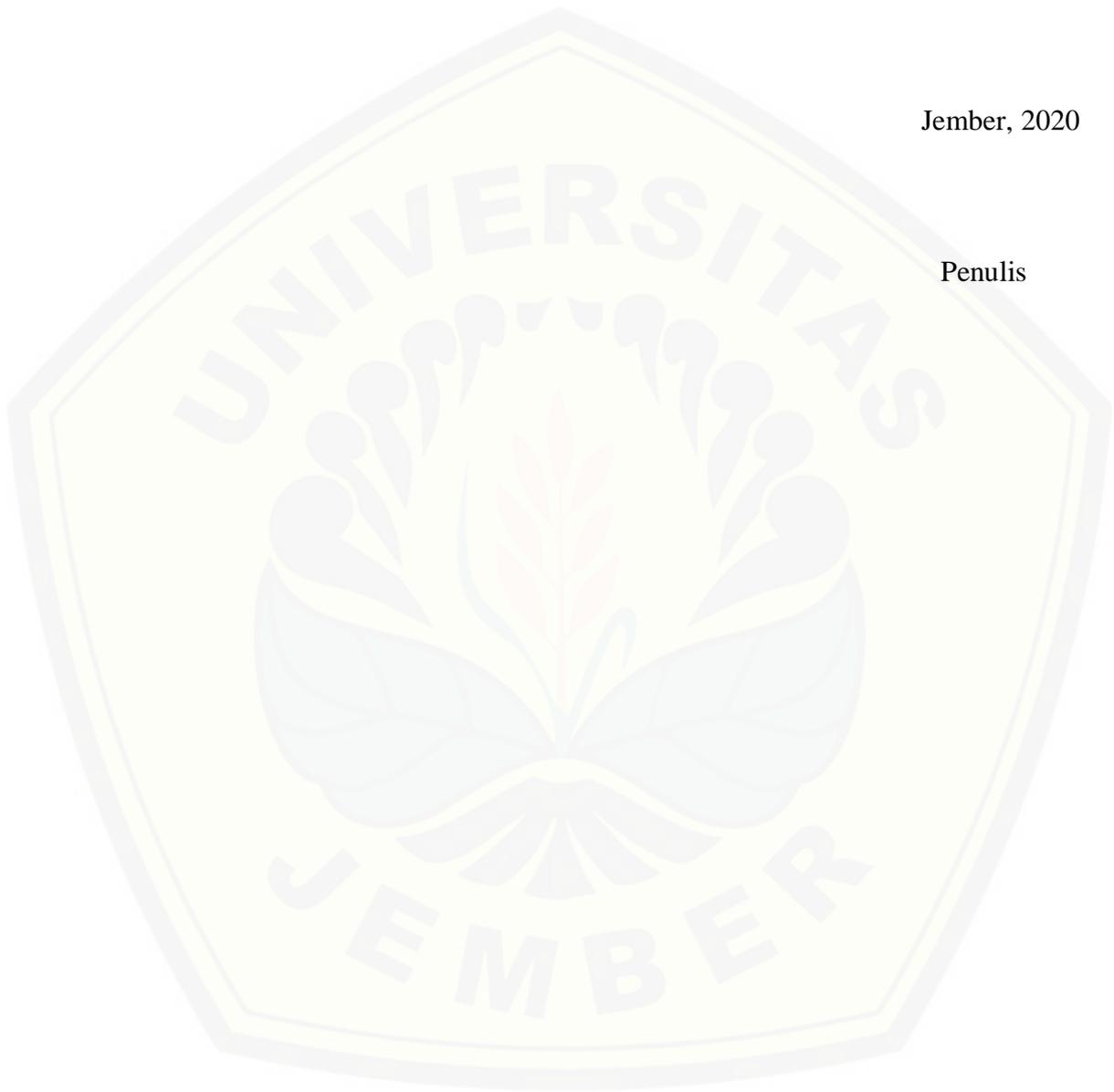
Dalam penulisan ini disadari oleh selaku penulis masih banyak kekurangan yang dimana disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dari penulis sendiri. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak yang ada, karena hal tersebut dengan segala kerendahan hati yang ada penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Istifadah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Dr. Herman Cahyo D., S.E., M.P selaku Koordinator Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan;
3. Dr. Riniati, M.P, selaku Ketua dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
4. Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Agus Luthfi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan pengarahan serta saran sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik.
6. Keluarga Tersayang, Ayahanda Soedarsono dan Ibunda Sumiyati serta kakak-kakaku Sastra dan Yuman, yang banyak berkorban untukku
7. Untuk Kalian, Keluarga tanpa perlu ikatan darah yang selalu menemaniku dalam keadaan suka dan duka, Adiet, Edy, Devin, Danu, Aldi, Yoga, Brian, Sulthon, Udin, Prima, Fika dan Ines
8. Teman-teman KKN 85 Jurang Sapi, Damar, Afrian, Rozi, Caca, Hany, Dita, Mbak Ajeng, Ayu dan Amanda

9. Teman-teman SMA yang ada di Jember yang selalu membuatku bahagia, Jagad, Aldi, Firdi, Zainul, Finsa dan Wido
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dimana tidak dapat disebutkan satu-persatu, banyak terima kasih doa dan dukungannya

Jember, 2020

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3.Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	<b>9</b>
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi .....	<b>9</b>
2.1.3 Ketimpangan Pembangunan Wilayah .....	<b>11</b>
2.1.4 Tenaga Kerja.....	<b>12</b>
2.1.5 Penanaman Modal.....	<b>13</b>
2.1.6 Belanja Modal.....	<b>14</b>
2.1.7 Belanja Fungsi Pariwisata .....	<b>15</b>
<b>2.2 Hasil Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>16</b>
<b>2.3 Kerangka Konseptual</b> .....	<b>26</b>

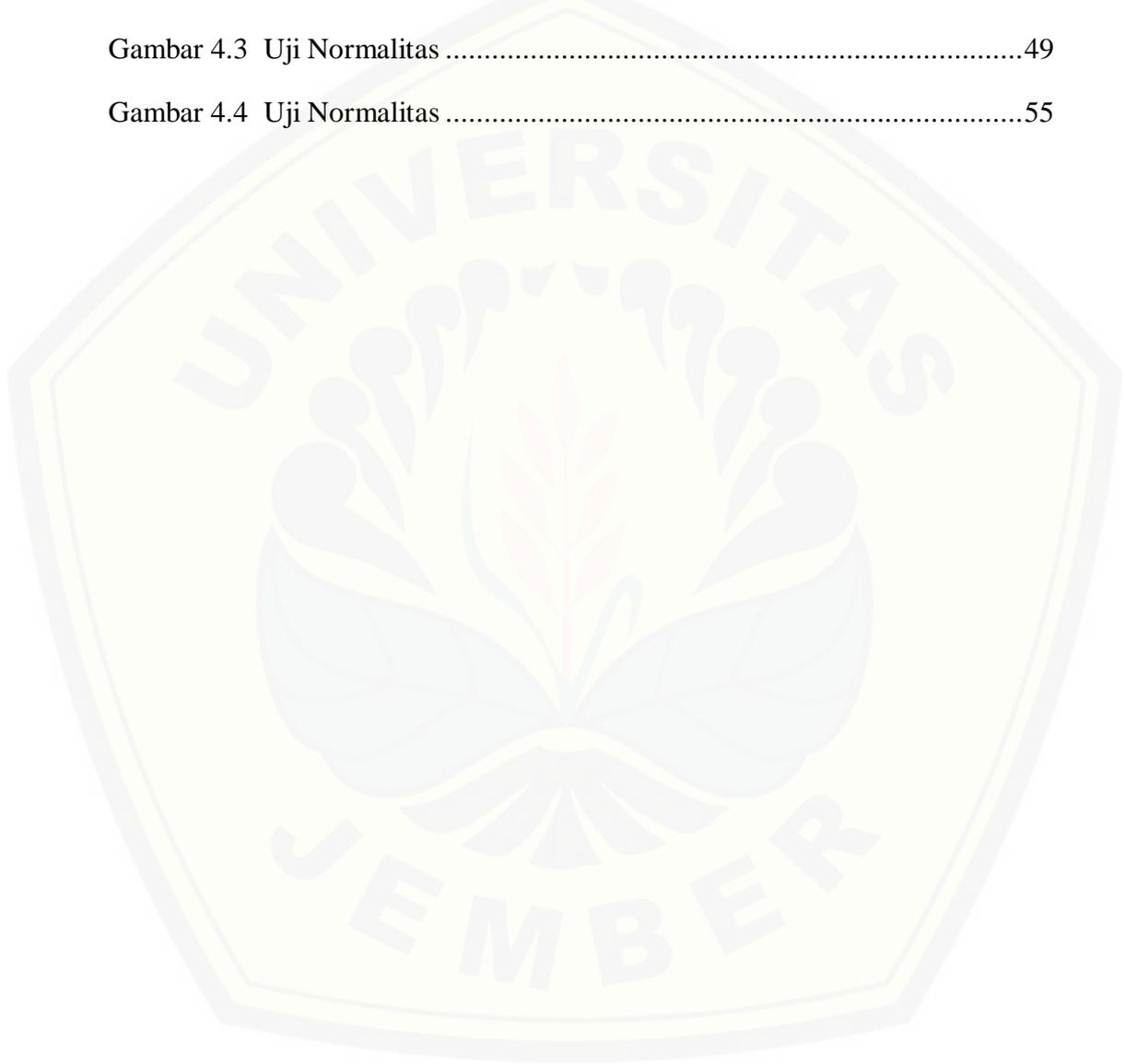
<b>2.4 Hipotesis Penelitian .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
<b>3.1 Rancangan Penelitian .....</b>	<b>29</b>
3.1.1 Jenis Penelitian .....	29
3.1.2 Wilayah penelitian .....	29
3.1.3 Unit Analisis .....	29
3.1.4 Jenis Sumber Data.....	30
<b>3.2 Metode Analisis Data.....</b>	<b>30</b>
3.2.1 Analisis Ketimpangan Wilayah .....	30
3.2.2 Analisis Regresi Data Panel .....	31
<b>3.3 Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1.1 Kondisi Penduduk dan Tenaga Kerja.....	39
4.1.2 Kondisi Ekonomi .....	40
<b>4.2 Hasil Analisis Data.....</b>	<b>45</b>
4.2.1 Analisis Ketimpangan Wilayah .....	45
4.2.2 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Daerah Utara Provinsi Bali .....	46
4.2.2 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Daerah Selatan Provinsi Bali.....	52
<b>4.3 Pembahasan .....</b>	<b>58</b>
4.3.1 Ketimpangan Daerah antar Daerah Utara Bali dan Daerah Selatan Bali .....	58
4.3.2 Faktor yang mempengaruhi ketimpangan di Daerah Utara dan Daerah Selatan Provinsi Bali.....	59
<b>BAB 5. KESIMPULAN.....</b>	<b>65</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>65</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>65</b>

**DAFTAR TABEL**

1.1 Tabel Perkembangan Indikator Ekonomi Menurut Daerah.....	5
1.2 Perbandingan Tenaga Kerja dan PDRB .....	6
2.1 Matrik Tabel Penelitian Terdahulu .....	20
4.1 Perkembangan Penduduk Menurut Daerah .....	39
4.2 Perkembangan PDRB Perkapita Menurut Daerah .....	42
4.3 Perkembangan Penanaman Modal Menurut Daerah.....	42
4.4 Perkembangan Belanja Modal Menurut Daerah.....	44
4.5 Perkembangan Belanja Fungsi Pariwisata Menurut Daerah .....	45
4.6 <i>Corellation Matrix</i> antarvariabel bebas.....	50
4.7 Hasil Uji Glejser .....	50
4.8 Tabel Hasil Uji F.....	51
4.9 Tabel Hasil Uji t.....	52
4.10 <i>Corellation Matrix</i> antarvariabel bebas.....	55
4.11 Tabel Hasil Uji Glejser.....	56
4.12 Tabel Hasil Uji F.....	57
4.13 Tabel Hasil Uji t.....	57

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	27
Gambar 4.1 Perkembangan Laju pertumbuhan Ekonomi Menurut Kawasan...	41
Gambar 4.2 Indeks Williamson Daerah Utara dan Selatan Provinsi Bali .....	46
Gambar 4.3 Uji Normalitas .....	49
Gambar 4.4 Uji Normalitas .....	55



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Daerah.....	75
Lampiran 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Daerah.....	76
Lampiran 1.3 Perkembangan PDRB per Kapita Menurut Daerah .....	77
Lampiran 1.4 Tenaga Kerja yang bekerja Menurut Daerah.....	78
Lampiran 1.5 Rata Lama Sekolah Menurut Daerah .....	79
Lampiran 1.6 Realisasi Penanaman Modal Menurut Daerah.....	80
Lampiran 1.7 Belanja Modal Menurut Daerah.....	83
Lampiran 1.8 Belanja Fungsi Pariwisata Menurut Daerah .....	84
Lampiran 4.1 Indeks Williamson Menurut Daerah .....	85
Lampiran 4.2 Data Hasil Uji <i>Likelihood</i> Daerah Utara Bali .....	86
Lampiran 4.3 Data Hasil Uji <i>Hausman</i> Daerah Utara Bali.....	87
Lampiran 4.4 Hasil Analisis Regresi Model Terpilih Daerah Utara Bali .....	88
Lampiran 4.5 Data Hasil Uji <i>Likelihood</i> Daerah Selatan Bali .....	89
Lampiran 4.6 Hasil Analisis Regresi Model Terpilih Daerah Selatan Bali .....	90

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Ketimpangan wilayah adalah tantangan pembangunan setiap negara, pola ketimpangan setiap negara berbeda-beda. Douglas C. North merupakan tokoh yang pertama kali mengemukakan tentang masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. North membuat hipotesa tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan. Hipotesa tersebut dikenal dengan hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008:105). Pada tahun 1960-an Williamson melakukan penelitian tentang ketimpangan wilayah di beberapa negara maju dan negara berkembang untuk menguji hipotesa tersebut. Hipotesa itu menunjukkan bahwa disparitas regional lebih besar di negara berkembang daripada negara maju, di negara berkembang disparitas regional meningkat pada tahap awal pembangunan, kemudian akan turun pada tingkat pembangunan yang matang. Menurut Williamson ketimpangan pembangunan yang menurun disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pemerataan pertumbuhan wilayah dan kesetaraan pendapatan, penemuan sumber daya baru di wilayah kurang berkembang dan sebagainya (Akai dan Sakata, 2005).

Menurut Myrdal ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi di suatu wilayah sehingga menyebabkan wilayah belakangnya mengalami dampak yang kurang baik. Ketimpangan di suatu wilayah akan semakin parah jika sebagian daerah tumbuh dengan merugikan wilayah lainnya yang mengalami stagnasi. Myrdal mengatakan bahwa daerah terbelakang kurang mampu berkembang secepat daerah maju karena adanya *backwash effect*. *backwash effect* membuat daerah terbelakang mengalami banyak hambatan dalam pengembangan ekonominya. (Gunnar Myrdal, 1957). Indonesia merupakan negara berkembang, yang mengalami ketidakmerataan pembangunan antar wilayahnya, sebagai negara kepulauan yang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, ketidakmerataan merupakan konsekuensi yang sulit dihindari. Karakteristik yang berbeda di setiap wilayah memberikan pengaruh yang kuat terhadap pola pembangunan ekonomi, sehingga menyebabkan pola pembangunan antar wilayah tidak seragam. Ketidakseragaman

itu akan berpengaruh terhadap kemampuan tumbuh, dan pada akhirnya mengakibatkan beberapa wilayah tumbuh dengan cepat dan sementara itu terdapat wilayah yang tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh yang berbeda inilah yang akan menciptakan ketimpangan, baik pembangunan maupun ketimpangan dalam bentuk hasilnya yaitu pendapatan antar daerah (Sianturi, 2011)

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang mengalami ketidakmerataan antarwilayahnya, Provinsi Bali yang didalamnya terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Wilayah Kota ini, mempunyai perbedaan karakteristik di setiap wilayahnya. Perbedaan letak geografis dan potensi sumber daya yang berbeda di setiap wilayah inilah yang menyebabkan pola pembangunan ekonomi di Provinsi Bali menjadi tidak seragam dan menyebabkan kemampuan tumbuh beda, kemampuan tumbuh beda inilah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan. Ketimpangan berupa pembangunan maupun hasil, ketimpangan pembangunan meliputi ketimpangan pendapatan perkapita dan ketimpangan dalam kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri

Wihadanto & Dicky Firmansyah (2013) dalam penelitiannya membagi Provinsi Bali menjadi 2 bagian berdasarkan pendapatan perkapita yaitu Bali bagian utara dan Bali bagian selatan, Bali bagian utara meliputi Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung sedangkan Bali selatan atau yang di sebut kawasan metropolitan sarbagita yang terdiri dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan. Ketimpangan pembangunan antara daerah utara dan selatan merupakan masalah yang serius dan menjadi sorotan di Provinsi Bali bahkan menjadi isu-isu politik. semestinya ketimpangan pembangunan antara kabupaten/kota tidaklah terjadi, karena Provinsi Bali terbilang relatif kecil dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Terlebih lagi daerah Bali utara dulu lebih maju dibandingkan daerah selatan, dulu Ibukota Provinsi Bali berada di Kabupaten Buleleng, sehingga karena letaknya di daerah pantai utara terdapat sebuah Pelabuhan besar yang merupakan pintu masuk utama ke Provinsi Bali oleh karena itu distribusi barang yang masuk dan keluar Bali melalui Pelabuhan Bali Utara dan dari sanalah para wisatawan mulai melakukan

perjalanan ke seluruh daerah yang ada di Bali, namun sejak Ibukota Provinsi dipindahkan dari Kabupaten Buleleng ke Kota Denpasar pada tahun 1958, Daerah Bali Utara mulai berangsur-angsur ditinggalkan, gerbang utama pulau Bali lebih banyak melalui Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dan melalui Pelabuhan Benaol tidak lagi melalui Pelabuhan Buleleng. Ditambah lagi dengan adanya otonomi daerah yang memberikan hak, wewenang dan kewajiban mengatur wilayahnya masing-masing sesuai aset yang dimilikinya. Sehingga membuat daerah Bali utara bagaikan daerah mati tidak tersentuh pembangunan (Agung kresna, 2018).

Sudah banyak cara yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali untuk menekan tingkat ketimpangan antar daerah utara dan selatan, Guna mengembalikan kesejahteraan Daerah Bali Utara, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti pembangunan *shortcut* penghubung daerah Bali Utara dan Selatan serta merancang pembuatan Bandar Udara baru di daerah Bali Utara yang diharapkan akan meningkatkan kehadiran investor ke Bali Utara dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan membuka peluang terjadinya keseimbangan kesejahteraan antara masyarakat Bali Utara dengan Bali Selatan. Dan juga dengan dirancangnya Undang-Undang baru Provinsi Bali menggantikan UU No 64 Tahun 1958 yang dirasa tidak relevan dengan perkembangan masa kini, jika RUU tersebut disahkan menjadi UU, hal itu akan lebih memperkuat otonomi di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bali (Koster, 2019)

Pesatnya pembangunan pariwisata dirasakan di daerah Bali selatan, Bali selatan mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam hal perekonomian dibanding Bali utara, daerah Bali selatan pendapatannya sangat besar yang menyebabkan masyarakat Bali utara datang ke Bali selatan untuk mencari penghidupan. Dari jutaan wisatawan yang bertandang ke Bali, baik wisatawan mancanegara maupun domestik, sebagian besar memilih berwisata di daerah selatan. Mereka juga menginap di hotel serta makan di restoran yang ada di daerah selatan. Dengan begitu, lebih banyak pajak hotel dan restoran (PHR) yang dinikmati oleh daerah di Bali Selatan. Adapun daerah Bali utara, benar-benar hanya menikmati sedikit kue perekonomian ini.

Indikasi ketimpangan daerah utara dan selatan Bali dapat dilihat dari perbedaan perkembangannya ekonominya, Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2018 kontribusi PDRB daerah selatan sangat dominan dan tidak pernah kurang dari 65% terhadap PDRB Provinsi Bali sedangkan kontribusi PDRB daerah utara terhadap PDRB Provinsi Bali hanya sekitar 33%, sementara itu di laju pertumbuhan ekonominya, kedua daerah tersebut mengalami fluktuasi, meskipun demikian laju pertumbuhan ekonomi daerah selatan lebih tinggi dibandingkan daerah utara Provinsi Bali.

Tabel 1.1 Data Indikator Ekonomi Menurut Daerah

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)		Kontribusi PDRB terhadap PDRB Bali (%)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Bali Utara	Bali Selatan	Bali Utara	Bali Selatan	Bali Utara	Bali Selatan
2011	35.946	68.665	34.36%	65.64%	6.00	6.87
2012	39.892	78.095	33.81%	66.19%	6.25	7.09
2013	44.886	89.514	33.40%	66.60%	6.20	6.76
2014	52.218	104.458	33.33%	66.67%	6.17	6.83
2015	58.973	117.989	33.33%	66.67%	6.11	6.22
2016	64.837	130.336	33.22%	66.78%	6.08	6.44
2017	70.794	143.780	32.99%	67.01%	5.27	5.74
2018	76.913	157.836	32.76%	67.24%	5.54	6.23

Sumber: Badan Pusat Statistika Tahun 2019, diolah

Selain itu jika dilihat dari perkembangan PDRB perkapita, pada tahun 2011 PDRB per kapita daerah Bali selatan sebesar 29.923.135 rupiah. Sedangkan daerah Bali utara sebesar 20.721.074 rupiah. Pada tahun 2018, PDRB perkapita daerah Bali selatan meningkat menjadi 61.320.552 rupiah dan PDRB perkapita daerah utara juga meningkat sebesar 42.415.214 rupiah, dengan demikian, perbedaan PDRB dan PDRB perkapita yang mencolok menandakan bahwa masih terjadi ketimpangan antar kawasan di Provinsi Bali. kondisi tersebut sesuai

dengan pendapat Myrdal yang mengatakan pembangunan ekonomi menciptakan suatu proses sebab menyebab sirkuler yang membuat si kaya memperoleh keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang semakin terhambat sehingga dalam jangka panjang pendapatan per kapita antardaerah cenderung timpang (Jhingan, 2012:211-212)

Masalah ketimpangan yang harus ditelusuri adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan ketimpangan tersebut. Rosmeli (2015) menunjukkan bahwa perbedaan tenaga kerja dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan wilayah. Menurut teori Adam Smith, alokasi SDM merupakan sebuah *necessary condition* bagi pertumbuhan ekonomi, wilayah yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih banyak, maka output yang dihasilkan wilayah tersebut akan lebih besar dibandingkan wilayah yang memiliki tenaga kerja yang lebih sedikit Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tenaga kerja di Provinsi Bali cenderung terkonsentrasi di daerah selatan dan output yang dihasilkan juga berbeda antara daerah utara dan selatan.

Tabel 1.2 Perbandingan Tenaga Kerja dan PDRB

Tahun	Daerah Bali Utara		Daerah Bali Selatan	
	Tenaga Kerja (orang)	PDRB (Miliar)	Tenaga Kerja (orang)	PDRB (Miliar)
2011	943,174	35.946	1,215.984	68.665
2012	977,817	39.892	1,274.658	78.095
2013	962,767	44.886	1,279.309	89.514
2014	960,791	52.218	1,311.841	104.458
2015	969,582	58.973	1,355.223	117.989
2016	987,814	64.837	1,373.742	130.336
2017	1,006,045	70.794	1,392.262	143.780
2018	1,038,504	76.913	1,452.366	157.836

Sumber: Badan Pusat Statistika Tahun 2019, diolah

Perbedaan penyebaran penanaman modal juga dapat menyebabkan ketimpangan antar daerah. Berdasarkan lampiran 1.6 jumlah investasi yang masuk di daerah selatan lebih besar dibandingkan daerah utara Provinsi Bali. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya *pull factors* dan *push factor*. Myrdal mengatakan bahwa investasi cenderung menambah ketidakmerataan (Adisasmita 2005:37), hal tersebut dikarenakan di wilayah maju, naiknya tingkat investasi di dorong oleh permintaan barang dan jasa dan akan menyebabkan peningkatan pendapatan, sedangkan di wilayah kurang maju, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat rendah. Dan juga investasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap ketimpangan pembangunan, artinya semakin tinggi investasi yang masuk di suatu daerah, maka akan meningkatkan ketimpangan pembangunan antar daerah. (Barika, 2012) dan (bakri, syafrizal, dan aimon, 2016)

Kebijakan Fiskal adalah instrumen utama pemerintah untuk mengatur pendapatan negara di alokasikan kepada kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat secara adil dan dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat. Salah satunya adalah belanja modal pemerintah yang mempunyai peran penting dalam mengurangi terjadinya ketimpangan, belanja modal adalah pengeluaran pemerintah untuk perolehan aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi, dengan tersedianya fasilitas dan pelayanan publik yang memadai akan membuat masyarakat lebih aktif dan memicu masyarakat dalam bekerja, dan diharapkan dengan adanya fasilitas yang memadai akan meningkatkan jumlah investasi di setiap daerah yang akan mempercepat pembangunan dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat ketimpangan yang ada.

Di sisi lain, sektor pariwisata memegang peranan yang cukup penting di dalam perekonomian Provinsi Bali. sektor pariwisata menyumbang 60 persen terhadap PDRB Provinsi Bali dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Pariwisata juga berpotensi besar terhadap terciptanya berbagai usaha baru seperti perhotelan, akomodasi transportasi dan makanan yang langsung maupun tidak langsung meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah daerah Provinsi

Bali di dalam beragam kebijakan pembangunan, menjadikan sektor pariwisata menjadi prioritas utama. Banyak program telah dijalankan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengembangan sektor pariwisata seperti penataan destinasi, promosi wisata, pengembangan prospek wisata, pembinaan industri pariwisata dan penataan kelembagaan aspek-aspek kepariwisataan. Alokasi belanja pariwisata tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan dibarengi dengan pengurangan tingkat ketimpangan yang terjadi di daerah utara dan selatan Provinsi Bali.

Dari latar belakang diatas, maka pada penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS KETIMPANGAN DAERAH UTARA DAN SELATAN PROVINSI BALI TAHUN 2011-2018”** untuk menghitung seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi di Daerah utara dan selatan Provinsi Bali dan pengaruh variabel terhadap ketimpangan daerah utara dan selatan Provinsi Bali.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat Ketimpangan Daerah Utara Provinsi Bali dan Daerah Selatan Povinsi Bali tahun 2011-2018
2. Apakah Tenaga Kerja , Penanaman Modal , Belanja Modal, dan Belanja Fungsi Pariwisata secara parsial mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan di Daerah Selatan Bali dan Daerah Bali Utara tahun 2011-2018

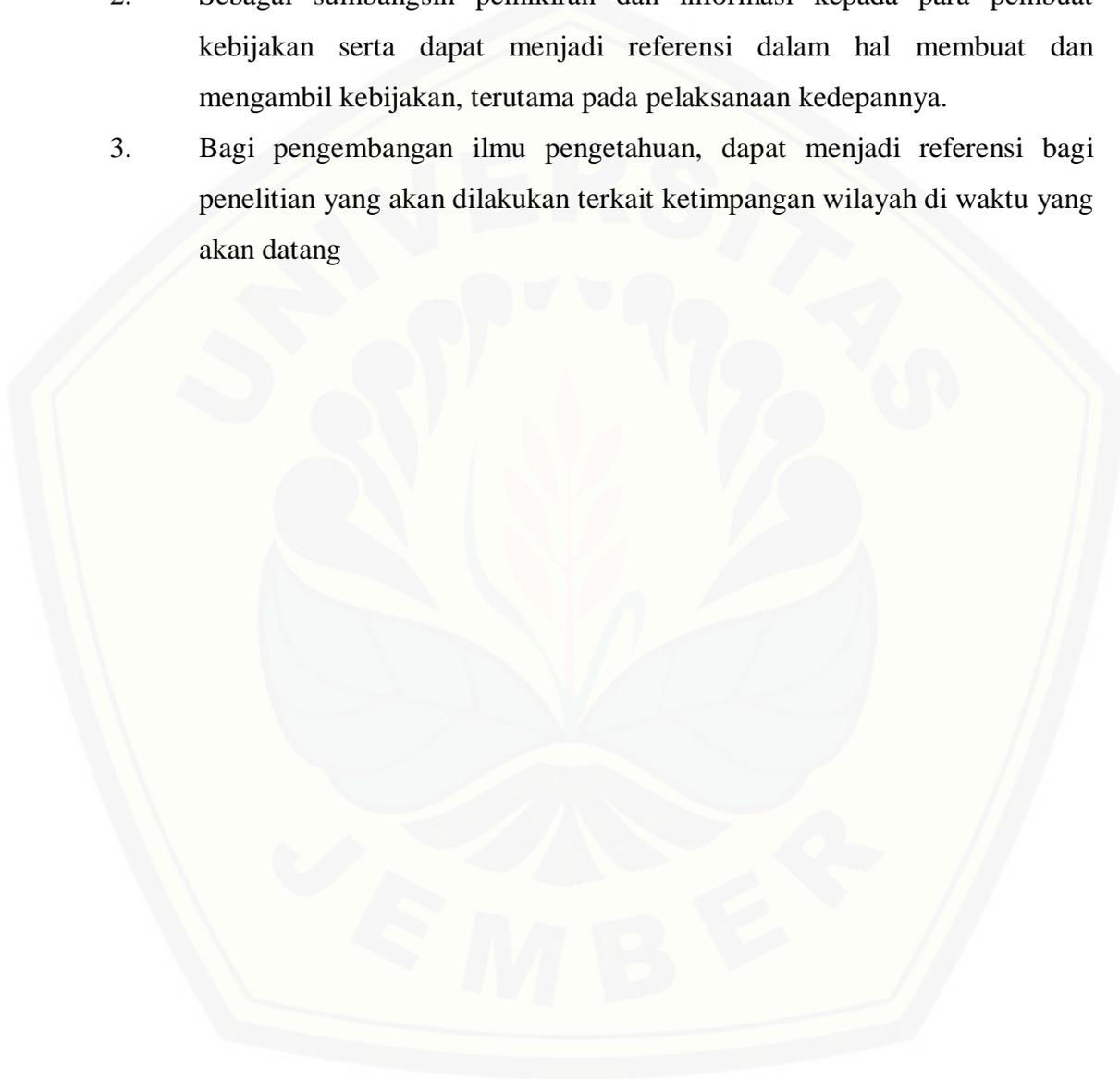
### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan di Daerah Utara dan Daerah Selatan Provinsi Bali
2. Menganalisis pengaruh variabel Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Belanja Modal, dan Belanja Fungsi Pariwisata terhadap tingkat ketimpangan yang terjadi di Daerah Utara dan Selatan Provinsi Bali

#### 1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi pemerintah daerah, sebagai pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengkaji kebijakan dan strategi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
2. Sebagai sumbangsih pemikiran dan informasi kepada para pembuat kebijakan serta dapat menjadi referensi dalam hal membuat dan mengambil kebijakan, terutama pada pelaksanaan kedepannya.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan dilakukan terkait ketimpangan wilayah di waktu yang akan datang



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

a. Teori Klasik Adam Smith

Salah satu penganut teori klasik adalah Adam Smith. Menurut kaum fisiokrat menganggap kemakmuran negara ditentukan oleh alam, sebaliknya teori klasik Adam Smith menganggap bahwa manusia adalah faktor produksi yang utama yang sangat menentukan bagi kemakmuran suatu negara (Deliarnov, 2014:30). Menurut Adam Smith alam atau tanah tidak mempunyai arti jika tidak ada sumberdaya manusia yang dapat mengolahnya sehingga memiliki manfaat bagi kehidupan. Di dalam teori Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia merupakan *necessary condition* bagi pertumbuhan ekonomi dan juga, Adam Smith menekankan adanya pembagian kerja guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja, jika produktivitas tenaga kerja itu meningkat maka juga akan meningkatkan output yang dihasilkan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di dalam teorinya Adam Smith juga sangat mendukung motto *laissez faire-laissez passer*. Adam Smith menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin di dalam perekonomian, menurutnya dalam perekonomian ada tangan tak nampak (*invisible hand*) yang membuat perekonomian ke keseimbangan. Perekonomian terlalu banyak campur tangan pemerintah akan mengakibatkan ketidakseimbangan. Oleh karena itu sistem ekonomi yang cocok dengan pemikirannya adalah sistem liberal atau kapitalis karena memberikan kewenangan seluas-luasnya setiap individu untuk bertindak bagi perekonomian.

b. Teori Neo-Klasik Solow-Swan

Menurut teori ini, suatu pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada penyediaan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Teori ini menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antar input produksi yang sesuai

dengan faktor produksi dengan asumsi *return to scale* dan elastisitas positif (substitusi) di antara input produksi (Dawkins, 2003:138).

Bort dan Stein (1964) memodifikasi model pertumbuhan ekonomi neo-klasik untuk konteks regional (Dawkins, 2003:138). Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, mobilitas tenaga kerja, dan mobilitas modal antardaerah (Sjafrizal, 2008:95), di dalam teori neo-klasik, tenaga kerja dan modal mudah berpindah dari wilayah satu ke wilayah lain sehingga menimbulkan dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori neo-klasik, untuk membangun kinerja perekonomian suatu wilayah dibutuhkan akumulasi modal. Negara berkembang sangat memerlukan suatu investasi lebih khusus suatu investasi asing disaat investasi dalam negerinya tidak mencukupi membiayai pembangunan.

Teori neo-klasik juga menyatakan bahwa penanaman modal asing mempunyai kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi di *host country* (negara penerima investasi). Modal asing yang dibawa ke negara penerima investasi juga dapat mendorong penanaman modal dalam negeri untuk berbagai kegiatan. (Zaidun, 2008).

#### c. Teori Keynes

John Maynard Keynes merupakan tokoh ekonomi dari Inggris yang sangat berpengaruh di abad ke-20 dan merupakan pendiri ekonomi makro modern, dan dikenal sebagai pendiri mazhab Keynes, di tahun 1936 Keynes menantang gagasan teori neo-klasik melalui bukunya yang diberi judul "*the general theory of employment, interest and money*"

Menurut Keynes, intervensi yang dilakukan pemerintah dalam perekonomian merupakan hal yang wajar ketika terjadi kegagalan pasar atau *market failure*, pemerintah diperlukan untuk mendistribusikan hasil-hasil perekonomian dari kelompok masyarakat yang lebih beruntung kepada yang kurang beruntung (Gruber, 2012). Menurut Keynes pengeluaran yang dilakukan pemerintah merupakan variabel eksogen dari perkembangan ekonomi (Olamola, 2004), dengan demikian hubungan kausalitas menurut Keynes bersifat pengeluaran pemerintah menyebabkan perkembangan ekonomi.

### 2.1.3 Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan pembangunan wilayah adalah suatu kondisi ketidakmerataan pembangunan antarsektor dan antarwilayah yang ditunjukkan melalui perbedaan pertumbuhan antarwilayah, perbedaan pertumbuhan ini bergantung kepada pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan struktur wilayah. Perkembangan sarana dan prasarana pembangunan, kondisi ekonomi, teknologi, transportasi dan komunikasi dan perdagangan antarwilayah, komposisi industri, kemampuan pendanaan dan pembiayaan terhadap pembangunan daerah, kesempatan kerja, investasi dan lain-lainnya saling berpengaruh dengan sektor-sektor ekonomi dalam menciptakan ketimpangan wilayah.

Permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah secara teori di munculkan oleh Douglas C.North di dalam analisisnya tentang teori Neo-Klasik, yang di dalamnya terdapat suatu prediksi hubungan tingkat pembangunan ekonomi dengan dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan prediksi ini dikenal dengan sebutan hipotesa Neo-Klasik di dalam hipotesa tersebut di nyatakan bahwa di dalam permulaan proses pembangunan, ketimpangan antarwilayah cenderung mengalami peningkatan yang berlangsung sampai mencapai titik puncak kemudian bila proses pembangunan berlanjut maka tingkat ketimpangan berangsur-angsur mengalami penurunan (Sjafrizal, 2008).

Fenomena ketimpangan pada kenyataannya tidak akan bisa dihilangkan di dalam suatu pembangunan wilayah. Dengan adanya ketimpangan akan memberikan dorongan kepada wilayah terbelakang untuk berbenah meningkatkan kualitasnya supaya tidak jauh tertinggal dengan wilayah sekitarnya dan membuat wilayah tersebut bersaing untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga dengan terjadinya ketimpangan akan memberikan hal yang positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan hal yang negatif dengan semakin tingginya ketimpangan antarwilayah yang berupa inefisiensi ekonomi, stabilitas sosial dan solidaritas yang melemah (Todaro,2004)

#### 2.1.4 Tenaga Kerja

Menurut UU No. 13 tahun 2004, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), tenaga kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja (penduduk yang berusia 15 tahun ke atas). Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja yang termasuk angkatan kerja dan penduduk usia kerja yang termasuk bukan angkatan kerja.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yaitu 15 tahun dan lebih yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja yang digolongkan bekerja adalah:

1. Mereka yang dalam seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan yang lama bekerja paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu
2. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam tetapi mereka adalah:
  - a. Pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/ peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya
  - b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah).
  - c. Pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya. Seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial dan sebagainya

Angkatan kerja yang digolongkan menganggur dan sedang mencari pekerjaan yaitu mereka yang belum pernah bekerja, tetapi saat ini sedang berusaha mencari pekerjaan; mereka yang sudah pernah bekerja, tetapi pada saat pencacahan

menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan; dan mereka yang dibebaskan tugas dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi (yaitu mereka yang pensiun, orang-orang yang cacat jasmani yang tidak melakukan selama seminggu yang lalu)

### **2.1.5 Penanaman Modal**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya untuk mempertahankan modal
2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba
3. Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN). Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk

membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

PMA dan PMDN diperlukan untuk merangsang pertumbuhan dan pemerataan, diharapkan meningkatkan peran aktif dari masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat menurunkan ketimpangan antarwilayah, namun semakin banyak investasi yang masuk ke suatu wilayah juga dapat menyebabkan ketimpangan. Hal ini sesuai apa yang di katakan Myrdal (dalam Adisasmita, 2005:37) yang mengatakan bahwa investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Hal ini dikarenakan di wilayah maju, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang membuat pendapatan masyarakat juga meningkat. Sedangkan di wilayah kurang maju, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat rendah.

#### **2.1.6 Belanja Modal**

Kendali pemerintah di dalam pertumbuhan ekonomi terletak pada anggaran yang memuat jumlah dan tujuan anggaran tersebut digunakan. Salah satu pos anggaran yang terdapat di dalam APBD adalah belanja modal. Belanja modal yang digunakan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Halim (2008: 101) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam Belanja Modal adalah: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Gedung dan Bangunan; 4) Belanja

Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap lainnya; 6) Belanja Aset lainnya (Halim, 2014:229).

Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar menciptakan *multiplier effect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Menggenjot belanja modal adalah perkara sangat penting karena meningkatkan produktivitas perekonomian. Semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian, Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun.

### **2.1.7 Belanja Fungsi Pariwisata**

Belanja fungsi pariwisata merupakan belanja pemerintah yang dilakukan untuk pengembangan sektor pariwisata, melalui beragam program yang di antaranya meliputi penataan destinasi dan kelembagaan kepariwisataan, pengembangan produk wisata, dan promosi wisata. Di negara berkembang seperti Indonesia pengembangan pariwisata merupakan hal yang penting, karena industri pariwisata adalah industri yang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan nilai suatu wilayah geografis Ryan (1991 dalam Pitana dan Gayatri 2005).

Pariwisata merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi karena sektor pariwisata memiliki keterkaitan pada hampir semua subsektor ekonomi. Sehingga memberikan kontribusi pada perekonomian perekonomian di Indonesia. Pariwisata dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan devisa di Indonesia, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, daerah dan pusat serta sebagai wahana bagi masyarakat agar dapat memupuk rasa cinta tanah air sekaligus pengenalan budaya (Puspitasari, Saleh, dan Yunitasari, 2018). Pariwisata merupakan industri *low cost*, tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar dalam memberikan keuntungan. Daya tarik wisata seperti sumber daya alam dan kebudayaan adalah modal utama dalam pengembangan pariwisata. Keuntungan lainnya adalah suatu cara bagi pemerintah

dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena pariwisata memberikan kesempatan bagi penduduk lokal memasarkan bermacam-macam komoditi dan pelayanan untuk konsumen yang akan datang. Membuka kesempatan untuk mendiversifikasikan ekonomi lokal yang menyentuh kawasan-kawasan terpinggir, membuka peluang usaha terhadap usaha-usaha padat karya berskala kecil dan menengah.

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Ketimpangan wilayah merupakan aspek umum yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan pembangunan merupakan kondisi ketidakmerataan pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang ditunjukkan oleh perbedaan pertumbuhan antarwilayah.

Penelitian Rohman (2017) tentang analisis ketimpangan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta Tahun 2012 sampai 2016. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa regresi linier berganda dengan variabel bebas IPM, PAD, UMK dan jumlah penduduk. Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel IPM dan PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan ekonomi, variabel UMK dan variabel Jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan ekonomi.

Penelitian Angelia (2010) tentang ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995 sampai 2008. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa regresi linier berganda dengan variabel bebas PDRB perkapita, Aglomerasi, Investasi dan desentralisasi fiskal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dengan menggunakan pendekatan PDRB perkapita relatif tingkat ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta tahun 1995 sampai 2008 tergolong tinggi, di dalam perhitungan regresi, variabel aglomerasi dan PDRB perkapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di provinsi DKI Jakarta, variabel investasi dan dummy desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian Bakri, Syafrizal, Aimon (2016) tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier berganda dengan variabel bebas pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, investasi dan dana perimbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi, Investasi dan dana perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian Barika (2012) tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005 sampai 2009. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier berganda dengan variabel bebas Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Penduduk dan Investasi Swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penduduk dan Investasi Swasta berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan Daerah di Provinsi Bengkulu. Sementara itu pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Rosmeli (2015) tentang Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier berganda dengan variabel bebas Investasi dan Tenaga Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2000–2014 rata-rata sebesar 0.41 dan terus mengalami penurunan. Dari hasil regresi data panel diketahui bahwa PMDN mempunyai tidak pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan dan mempunyai pengaruh negatif, sedangkan PMA dan Tenaga kerja mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan kawasan timur Indonesia.

Penelitian Budiantoro Hartono (2008) tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier berganda dengan variabel bebas investasi swasta, angkatan kerja dan alokasi dana bantuan pembangunan daerah.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang diukur dengan Indeks Williamson dalam kurun waktu 1981 sampai dengan 2005 cenderung relatif meningkat dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yaitu investasi swasta, ratio angkatan kerja, dan alokasi dana pembangunan berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian Ginting (2014) tentang Ketimpangan Pembangunan di Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dan kuantitatif dengan variabel bebas PDRB per kapita, Investasi dan Aglomerasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2004 sampai dengan 2012 indeks williamson untuk Indonesia bagian timur lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia antara Indonesia bagian barat dan timur masih terjadi. Kedua, berdasarkan regresi, variabel PDRB per kapita dan investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah, sedangkan variabel aglomerasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Yunitasari dan Firmansayah (2019) tentang pemetaan ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016. Alat analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan Dari beberapa Bakorwil yang ada di Jawa Timur selama tahun 2010-2016 Kabupaten/Kota yang termasuk maju dan tumbuh cepat adalah Kota Madiun, Bojonegoro, Mojokerto, Gresik, Batu, Sidoarjo, Surabaya, dan Kabupaten Pasuruan, sedangkan Kabupaten/Kota yang maju tapi tertekan adalah Kota Kediri, Kota Malang dan Kabupaten/kota yang berkembang cepat adalah Kabupaten Lamongan, Kota Blitar, Banyuwangi dan Kota Probolinggo, dan Kabupaten/Kota yang relatif tertinggal adalah Kabupaten/Kota yang belum disebutkan.

Tabel 2.1 Matrik Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Rohman Anugrah Sulisty (2017).	Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta Tahun 2012-2016	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. PAD 3. UMK 4. Jumlah Penduduk	Analisis regresi linier berganda	Di dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM, PAD mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan ekonomi sedangkan variabel UMK dan Jumlah penduduk di dalam penelitian berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan ekonomi.
2.	Yuki Angelia (2010).	Analisis ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008.	1. PDRB perkapita 2. Aglomerasi 3. Investasi 4. desentralisasi fiskal	Analisis regresi linier berganda	Di dalam penelitian tingkat ketimpangan di DKI Jakarta tahun 1995 sampai 2008 tergolong tinggi. Variabel PDRB perkapita, aglomerasi

					berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan sedangkan variabel investasi dan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah DKI Jakarta tahun 1995 sampai 2008
3.	Bakri, Syafrizal, Aimon (2015).	Analisa ketimpangan pembangunan Antar Kabupaten/kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pertumbuhan ekonomi</li> <li>2. tenaga kerja</li> <li>3. investasi</li> <li>4. dana perimbangan</li> </ol>	Analisis regresi linier berganda	Di dalam penelitian ini menyimpulkan variabel pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan yang terjadi di Sumatera Barat, sedangkan variabel tenaga kerja tidak

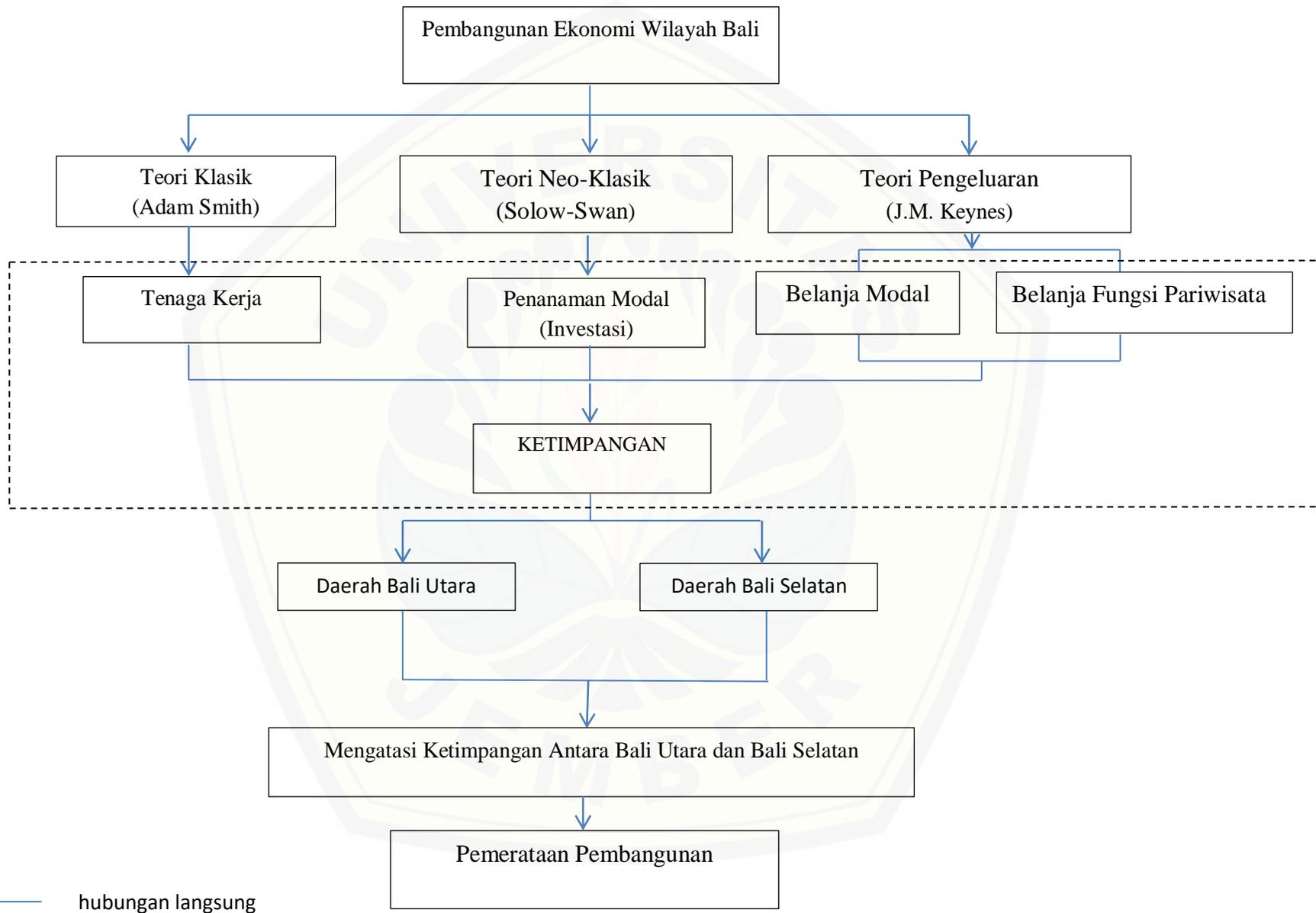
					berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan yang terjadi
4.	Barika (2012).	Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengeluaran Pemerintah</li> <li>2. Pertumbuhan Penduduk</li> <li>3. Investasi Swasta</li> </ol>	Analisis regresi linier berganda	Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk dan investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan di Bengkulu tahun 2005 sampai 2009, sedangkan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan
5.	Rosmeli (2015).	Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi</li> <li>2. Tenaga Kerja</li> </ol>	Analisis regresi linier berganda	Dari hasil penelitian membuktikan bahwa ketimpangan pembangunan di kawasan timur Indonesia antara tahun 2000-2014 rata-

		Kawasan Timur Indonesia			raanya sebesar 0,41 dan mengalami trend yang menurun, dan dari hasil regresi menemukan bahwa variabel Penanaman modal asing dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan, sedangkan penanaman modal dalam negeri tidak mempunyai pengaruh signifikan
6.	Budiantoro Hartono (2008).	Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah	1. investasi swasta 2. angkatan kerja 3. alokasi dana bantuan pembangunan daerah	Analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Jawa Tengah tahun 1981 sampai dengan 2005 mengalami trend yang meningkat dan ketiga variabel

					yaitu investasi swasta, angkatan kerja dan alokasi dana bantuan pembangunan daerah berpengaruh terhadap ketimpangan di Jawa Tengah tahun 1981-2005
7.	Ginting, Ari Mulianta (2014).	Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDRBper kapita</li> <li>2. Investasi</li> <li>3. Aglomerasi</li> </ol>	analisa kualitatif dan kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan kawasan Indonesia timur lebih tinggi dibanding Indonesia barat selama tahun 2004 sampai 2012. Variabel aglomerasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan antarwilayah, sedangkan PDRB perkapita dan Investasi mempunyai pengaruh

					signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah
8.	Yunitasari D dan Firmansayah J (2019)	Pemetaan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDRB</li> <li>2. Pertumbuhan ekonomi</li> <li>3. Pendapatan perkapita</li> </ol>	Analisis Deskriptif Kualitatif	Dari beberapa Bakorwil yang ada di Jawa Timur selama tahun 2010-2016 Kabupaten/Kota yang termasuk maju dan tumbuh cepat adalah Kota Madiun, Bojonegoro, Mojokerto, Gresik, Batu, Sidoarjo, Surabaya ,dan Kabupaten Pasuruan, sedangkan Kabupaten/Kota yang maju tapi tertekan adalah Kota Kediri, Kota Malang dan Kabupaten/kota yang berkembang cepat adalah Kabupaten Lamongan, Kota Blitar, Banyuwangi dan Kota Probolinggo, dan Kabupaten/Kota yang relatif tertinggal adalah Kabupaten/Kota yang belum disebutkan

2.3 Kerangka Konseptual



Keterangan = ————— hubungan langsung

----- Ruang Lingkup Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara pada permasalahan yang dijadikan objek penelitian yang perlu dilakukan pengujian dan dibuktikan secara empiris tingkat kebenarannya melalui data-data yang terkait. Berdasarkan rumusan sebelumnya, maka hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga masih terjadi ketimpangan wilayah antar Daerah Utara Bali dan Daerah Selatan Provinsi Bali tahun 2011-2018
2. Diduga secara parsial tenaga kerja, penanaman modal, belanja modal dan belanja fungsi pariwisata mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Utara Provinsi Bali tahun 2011-2018
3. Diduga secara parsial tenaga kerja, penanaman modal, belanja modal dan belanja fungsi pariwisata mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Selatan Provinsi Bali tahun 2011-2018



## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

Rencana penelitian merupakan rencana kegiatan yang dibuat peneliti agar pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan baik, benar dan lancar serta diperoleh data yang valid sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Bali, Khususnya daerah Kabupaten/kota utara dan selatan dalam wilayah Provinsi Bali.

#### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan *explanatory*, jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan perkembangan atau kondisi ketimpangan wilayah berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson. Jenis penelitian *explanatory* yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat melalui pengujian hipotesa.

#### 3.1.2 Wilayah penelitian

Wilayah penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu Daerah Bali Utara dan Daerah Bali Selatan. Daerah Bali Utara dalam penelitian ini meliputi Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Klungkung. Daerah Bali Selatan dalam penelitian ini meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan

#### 3.1.3 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Ketimpangan wilayah sebagai variabel terikat sedangkan variabel bebasnya adalah tenaga kerja, penanaman modal, belanja modal, dan belanja fungsi pariwisata

### 3.1.4 Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data skunder yang berbentuk data panel yaitu gabungan dari data *time series* dan *cross section* yang bersumber dari Badan Pusat Statistika dan DJPK Kementerian Keuangan tahun 2011-2018 dan Data skunder dari penelitian ini meliputi data tenaga kerja, penanaman modal, belanja modal, dan belanja fungsi pariwisata

## 3.2 Metode Analisis Data

### 3.2.1 Analisis Ketimpangan Wilayah

#### a. Indeks Williamson

Dalam penelitian ini ketimpangan wilayah di ukur menggunakan Indeks Williamson. Nilai indeks Williamson terletak antara nol sampai dengan satu. Apabila nilainya mendekati nol maka ketimpangan yang terjadi adalah rendah, dan jika ketimpangan nilainya mendekati satu maka hal itu mengindikasikan ketimpangan wilayah yang tinggi dan mengindikasikan adanya suatu ketidakmerataan dalam pertumbuhan ekonomi. Indeks Williamson yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Bing, 2004):

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum (y_i - y)^2 \cdot \frac{f_i}{n}}}{y}$$

Dimana :

$I_w$  = Indeks Williamson

$y_i$  = PDRB per kapita daerah  $i$

$y$  = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah

$f_i$  = Jumlah penduduk daerah  $i$

$n$  = Jumlah penduduk seluruh daerah

Kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat ketimpangan yang terjadi berada di kategori ketimpangan rendah, sedang, atau tinggi sebagai berikut:

- Nilai Indeks Williamson antara 0 hingga 0,34 termasuk ketimpangan wilayah rendah

- Nilai Indeks Williamson antara 0,35 hingga 0,8 termasuk ketimpangan wilayah sedang
- Nilai Indeks Williamson lebih dari 0,8 termasuk ketimpangan wilayah tinggi

### 3.2.2 Analisis Regresi Data Panel

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah, di daerah utara dan selatan Provinsi Bali di analisis dengan menggunakan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah kombinasi antara *time series* dan *cross section*. Keunggulan menggunakan data panel yaitu yang pertama ada batasan heterogenitas dalam unit; kedua, menggunakan data panel lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antar variabel, lebih banyak *degree of freedom*, dan lebih efisien; ketiga, cocok untuk mempelajari dinamika perubahan; keempat, dengan menggunakan data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak dapat dilihat pada *time series* atau *cross section* murni; kelima, data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku murni; kelima, data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit; keenam, dapat menimumkan bias yang dalam agresi besar (Gujarati, 2011:237)

#### a. Permodelan Data Panel

Permodelan dengan menggunakan teknik regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan alternatif yaitu: (Gujarati, 2011:238-239)

1. *Pooled Least Square*, yaitu metode yang hanya menggabungkan data tanpa melihat sifat *cross section* dan *time series* pada data, dan dalam melakukan regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Persamaan regresinya sebagai berikut

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_p X_{pit} + \mu_{it}$$

Keterangan:

i = unit cross section

t = periode waktu

2. Metode *fixed effect*, yaitu metode dengan menggunakan variabel *dummy* (untuk menangkap adanya perbedaan intersep). Persamaan regresinya adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 W1_{it} + D_{2it} + \epsilon_{it}$$

3. Metode *random effect*, yaitu metode dimana slope antar individu adalah sama, tetapi intersep berbeda baik antar individu maupun antar waktu, namun rata-rata intersepnya adalah sama. Persamaan regresinya adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_{pit} X_{pit} + \epsilon_{it} + \mu_{it}$$

b. Spesifikasi Model Data Panel

1. Uji *Chow/Likelihood*

Uji chow digunakan untuk memilih model terbaik apakah *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Hipotesis nolnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah *pooled least square*, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah *fixed effect model*:

$H_0$  : *Pooled Least Square*

$H_a$  : *Fixed Effect Model*

Apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikansi, maka hipotesis nol ditolak, artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *fixed effect*, begitu sebaliknya.

2. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji LM digunakan untuk memilih model terbaik apakah *Pooled Least Square* atau *Random Effect Model*. Uji LM didasarkan pada nilai residual dari metode *Pooled Least Square*. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left( \frac{\sum_{i=1}^n (Te_i)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right)^2$$

Keterangan:

n : jumlah individu

T : jumlah periode

e : residual metode PLS

Hipotesis yang digunakan yaitu:

Ho : *pooled least square*

Ha : *random effect model*

Uji LM didasarkan pada distribusi chi-square dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik > nilai *chi-square*, maka Ho ditolak. Artinya, model yang tepat untuk regresi data panel adalah random effect model, begitu juga sebaliknya.

### 3. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik apakah *fixed effect model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Hipotesis nolnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah random effect model, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah *fixed effect model*

Ho: *random effect model*

Ha: *fixed effect model*

Apabila nilai probabilitas Hausman lebih kecil dari taraf signifikansi, maka hipotesis nolnya ditolak, artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah *fixed effect model*. begitu juga sebaliknya.

c. Estimasi Model Regresi

Model regresi dalam penelitian ini terdiri dari dua model, yaitu model regresi untuk daerah utara dan model regresi untuk daerah selatan Provinsi Bali, persamaan regresi yang akan diestimasi untuk daerah utara Provinsi Bali sebagai berikut:

$$KW = \beta_0 + \beta_1 TK_{it} + \beta_2 PM_{it} + \beta_3 BM_{it} + \beta_4 BFP_{it} + \epsilon_{it}$$

Sedangkan persamaan Regresi yang akan di estimasi untuk daerah selatan Provinsi Bali, sebagai berikut:

$$KW = \alpha_0 + \alpha_1 TK_{it} + \alpha_2 PM_{it} + \alpha_3 BM_{it} + \alpha_4 BFP_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

KW : Ketimpangan wilayah yang di ukur menggunakan indeks Williamson, satuannya adalah poin

TK : Tenaga kerja yang di ukur menggunakan jumlah total tenaga kerja yang bekerja, Satuannya adalah orang

PM : Penanaman modal yang di ukur dari realisasi PMA dan PMDN, satuannya adalah Rupiah

BM : Belanja modal yang di ukur menggunakan realisasi belanja modal dari total anggaran yang di alokasikan. Satuannya adalah rupiah

BFP : Belanja fungsi pariwisata dari total anggaran yang di alokasikan. Satuannya adalah rupiah

$\beta_0, \alpha_0$ : konstanta atau intersep

$\beta_1, \beta_7, \alpha_0, \alpha_7$ : koefisien

*i* : *crosssection*

*t* : *time series*

$\epsilon_{it}$  : eror

Adanya perbedaan satuan pada variabel yang digunakan, maka model ditransformasikan ke dalam model logaritma natural. Persamaan regresi untuk daerah utara, sebagai berikut:

$$\text{LNKW} = \beta_0 + \beta_1 \text{LNTK}_{it} + \beta_2 \text{LNPM}_{it} + \beta_3 \text{LNBM}_{it} + \beta_4 \text{LNBFP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Persamaan regresi untuk daerah selatan, sebagai berikut:

$$\text{LNKW} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LNTK}_{it} + \alpha_2 \text{LNPM}_{it} + \alpha_3 \text{LNBM}_{it} + \alpha_4 \text{LNBFP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

d. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi terdistribusi normal atau tidak. Normalitas dapat dilihat dari nilai probabilitas *Jarque-Bera* (JB), apabila nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi maka residual terdistribusi dengan normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya perbedaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Adanya heteroskedastisitas dalam data dapat diketahui dengan uji *White*, uji *Park*, uji *Glesjer*, uji *Wald*, sedangkan untuk mengatasi adanya masalah heteroskedastisitas dapat menggunakan *Generalized Least Square*.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Untuk mengetahui adanya masalah autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin-Watson*, *Breusch-Godfret Test* dan *Wooldridge Test*.

4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui korelasi linear yang tinggi diantara lebih dari dua variabel!

independen. Apabila di dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi di antara variabel bebas maka dinyatakan mengandung masalah multikolinearitas. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dapat dengan melihat nilai  $R^2$  dan nilai t statistik, Jika nilai  $R^2$  tinggi dan uji F menolak hipotesis nol, tetapi nilai t statistik sangat kecil atau tidak ada variabel bebas yang digunakan, maka hal tersebut menunjukkan gejala multikolinearitas.

e. Uji Statistik

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebasnya secara terhadap variabel terikat secara serentak. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistik dengan F-tabel, atau membandingkan probabilitas F statistik dengan taraf signifikansi. Apabila nilai F-statistik lebih besar dari F-tabel atau nilai probabilitas F kurang dari taraf signifikansi, maka variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sebaliknya, apabila nilai F-statistik lebih kecil dari F-tabel atau nilai probabilitas F lebih besar dari taraf signifikansinya, maka variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel atau membandingkan nilai probabilitas t dengan taraf signifikansi. Apabila nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel atau nilai probabilitas t kurang dari taraf signifikansi, maka secara parsial variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sebaliknya, apabila nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel atau nilai probabilitas t-statistik lebih besar dari taraf signifikansinya, maka secara parsial variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

$R^2$  atau *goodness of fit* digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin tepat model regresi yang digunakan sebagai alat uji dalam penelitian.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

#### 1. Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah adalah suatu kondisi ketidakmerataan pembangunan antarsektor dan antarwilayah yang ditunjukkan melalui perbedaan pertumbuhan antarwilayah. Dalam penelitian ini, Ketimpangan Daerah Bali Utara dan Bali Selatan selama tahun 2011-2018 dihitung dengan menggunakan indeks Williamson. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

#### 2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 15 tahun dan lebih (Badan Pusat Statistika, 2017). Tenaga kerja dalam penelitian ini menggunakan jumlah total tenaga kerja yang bekerja menurut daerah utara dan selatan Provinsi Bali. Data tenaga kerja dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistika Provinsi Bali tahun 2011-2018 Satuannya adalah orang.

#### 3. Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Provinsi Bali. Data penanaman modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah PMA dan PMDN di Provinsi Bali yang telah direalisasi, bersumber dari Badan Pusat Statistika Provinsi Bali tahun 2011-2018. Satuannya adalah Rupiah.

#### 4. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, bangunan infrastruktur dan harta lainnya yang menunjang kegiatan masyarakat .

Belanja modal dalam penelitian ini bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan selama tahun 2011-2018, Satuannya adalah Rupiah.

5. Belanja Fungsi Pariwisata

Belanja Fungsi Pariwisata adalah belanja yang dilakukan pemerintah daerah yaitu kabupaten/kota untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan melalui berbagai program kerja dan strategi mencakup pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan kelembagaan pariwisata. Belanja fungsi pariwisata dalam penelitian ini bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan selama tahun 2011-2018. Satuannya adalah Rupiah.

## BAB 5. KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya mengenai ketimpangan pembangunan antar Daerah Utara dan Daerah Selatan Provinsi Bali, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Selama tahun 2011-2018, masih terjadi ketimpangan di Daerah Utara dan Daerah Selatan Provinsi Bali yang dibuktikan dengan hasil perhitungan indeks Williamson, yaitu sebesar 0.1268 untuk Daerah Utara dan 0.1110 untuk Daerah Selatan. Ketimpangan di Daerah utara cenderung mengalami penurunan dan berada pada kategori rendah, sedangkan ketimpangan Daerah Selatan cenderung mengalami peningkatan.
2. Berdasarkan Hasil regresi, diperoleh hasil bahwa belanja modal dan belanja fungsi pariwisata mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Utara Bali, Belanja modal mempunyai hubungan yang negatif terhadap ketimpangan, sedangkan belanja fungsi pariwisata mempunyai pengaruh positif. Sementara itu, tenaga kerja dan penanaman modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Utara Bali, sementara itu berdasarkan Hasil regresi, Daerah Selatan Bali ,diperoleh hasil bahwa tenaga kerja dan belanja modal mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Daerah Selatan Bali, Tenaga kerja mempunyai hubungan positif terhadap ketimpangan Daerah Selatan dan Belanja Modal mempunyai pengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah Daerah Selatan. Sementara itu penanaman modal dan belanja fungsi pariwisata tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan Daerah Selatan Bali

### 5.2 Saran

Dalam rangka mengurangi ketimpangan yang terjadi di Daerah Utara dan Daerah Selatan Provinsi Bali, serta menimbang hasil kesimpulan penelitian dari pengaruh varabel Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Belanja Modal dan Belanja

Fungsi Pariwisata terhadap ketimpangan yang terjadi. Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan yang terjadi karena kualitas tenaga kerja yang terdapat di Daerah Utara berkualitas rendah dan rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan hanya sampai di tingkat sekolah dasar, oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan rata lama sekolah dan mengadakan pelatihan-pelatihan gratis seperti Balai Latihan Kerja (BLK Begitu juga di Daerah Selatan, tenaga kerja mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan, karena tenaga kerja yang berkualitas hanya terpusat di Kota Denpasar, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus meratakan kualitas tenaga kerja antar Kabupaten/Kota di Daerah Selatan
2. Penanaman modal di Daerah Bali Utara tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan yang terjadi di Daerah Utara Bali dikarenakan penanaman modal di arahkan kepada sektor tersier seperti pembangunan hotel dan restoran sedangkan Bali Utara sendiri dominan di sektor primer, oleh karena itu penanaman modal haruslah disesuaikan kepada keadaan ekonomi yang ada di Daerah utara yaitu tetap mengalokasikan penanaman modal di sektor pertanian tanpa mengurangi alokasi di sektor tersier.
3. Menimbang pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan yang terjadi di Daerah Utara dan Daerah Selatan yang mempunyai hubungan yang Negatif, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus menambah alokasi nilai belanja modal dan lebih di arahkan kepada pembuatan atau pembenahan fasilitas-fasilitas yang berhubungan langsung kepada masyarakat dan menunjang kegiatan yang dilakukan masyarakat dan diharapkan mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Belanja fungsi pariwisata di Kabupaten/Kota di Daerah Utara harus ditambah dan dibuat merata agar tidak ada kesenjangan alokasi belanja fungsi pariwisata sehingga tidak menimbulkan ketimpangan, sedangkan

belanja fungsi pariwisata harus di evaluasi lagi, alokasi belanja fungsi pariwisata harus lebih banyak di realisasikan kepada pembuatan objek-objek wisata baru sehingga banyak menyerap tenaga kerja dan meningkatkn nilai suatu wilayah.



## DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, H. Rahardjo. 2005. Dasar-dasar Ekonmi Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adisasmita, Rahardjo. 2013. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu

Agung, Kresna .2018. Membangun Kembali Bali Utara. www.balipost.com (akses Juli 2020)

Akai, Nobuo, Sakata, Masayo. 2005. Fiscal Decentralization, commitment, and Regional Inequality: Evience from state-level cross-sectional Data for thr United States. CIRJE-F315.

Ake Wihadanto dan Dicky Firmansyah Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Melalui'Mekanisme Kompensasi' Di Era Otonomi Daerah [Studi Kasus Provinsi Bali]

Angelia, Yuki. 2010. Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995 -2008. Skripsi Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. Yogyakarta: PB STIE YKPN.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. *Pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2011-2019*. Bali: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. *Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Bali 2019*. Bali: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. *Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Bali 2018*. Bali: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. *Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Bali 2017*. Bali: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. *Statistik Keuangan Pemerintah kabupaten/kota Se-Provinsi Bali 2015-2019*. Bali: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. *Statistik Keuangan Pemerintah kabupaten/kota Se-Provinsi Bali 2014-2018*. Bali: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. *Statistik Keuangan Pemerintah kabupaten/kota Se-Provinsi Bali 2013-2017*. Bali: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. *Statistik Pendidikan Provinsi Bali 2014*. Bali: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. *PDRB atas harga konstan kabupaten/kota 2011-2019*. Bali: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. *PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota 2011-2019*. Bali: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. *Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten/Kota 2011-2019*. Bali: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. *Realisasi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*. Bali: Badan Pusat Statistik

Bakri, Syafrizal, Aimon, Hasdi. 2016. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan penanggulangannya. *Jurnal. Universitas Negeri Padang*.

Barika, 2012. Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 4(3) : 1-11

Basuki, Agus Tri. 2014. *Regresi Model PAM, ECM dan Data Panel dengan Eviews 7*, Yogyakarta.

Bing, Shen. 2004. *China's Regional Disparity in 1981-2000: Openness and Development of Non-State-Owned enterprises and Fiscal Decentralization*. *Chinese Geographical Science*. 14(2) :97-103

Gruber, J. (2012). *Public Finance and Public Policy*. 4<sup>th</sup> edition. New York: Worth Publisher

Halim, A. (2008). *Akuntansi sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintahan (Bunga Rampai)*. Jakarta: Salemba Empat.

Jhingan, M.L. (2008). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?*. Jakarta: Salemba Empat.

Mustaqimah, Sri Hartoyo, Idqan Fahmi. 2017. Peran Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Pembangunan Manusia Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, hlm. 1-15 Vol 6 No 2.

Olomola, P. A. (2004). Cointegration analysis-causality testing and Wagner's law: The case of Nigeria, 1970-2001. *Journal of Social and Economic Development*, 6(1), 76-90.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi  
 Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi

Pradnyadewi, Diah, Purbadharmadja, Ida Bagus Putu. 2017. Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.

Puspitasari, I., Saleh, Moh., & Yunitasari, D. (2018). Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Periode Tahun 2011-2015. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 11

Rosmeli, R. (2015). Dampak Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(2)

Sholikhah, I., & Wahyudin, A. Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa *Accounting Analysis Journal*, 3(4).

Sjafrizal, (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Baduose Media: Padang. Bagian Barat. *Jurnal Buletin Prisma*: Jakarta.

Sjafrizal. (2012). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia*

Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ke Tiga*. Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.

Syafrizal (1997), "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat tahun 1997", *Jurnal Prisma LP3ES*, No 3.

Tarigan, Robinson.2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tjokrowinoto,M. 2005. *Pengurangan Kemiskinan Melalui Pariwisata : Perspektif Kebijakan Publik*.

Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ke Tiga*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga

Yunitasari, D., & Firmansayah, J. Z. (2019). Mapping Of Regional Inequality In East Java Province.

Zaidun, Muchammad. 2008. *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan*. Surabaya: Universitas Airlangga.

## Lampiran 1.1 Produk Domestik Bruto Menurut Daerah

Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Jember	6,296	6,973	7,770	9,020	10,198	11,168	12,116	13,143
Kab. Klungkung	3,969	4,398	4,900	5,676	6,426	7,112	7,785	8,463
Kab. Bangli	3,048	3,363	3,779	4,382	4,946	5,457	5,977	6,493
Kab. Karangasem	7,443	8,232	9,293	10,785	12,233	13,411	14,598	15,873
Kab. Buleleng	15,190	16,927	19,144	22,355	25,170	27,690	30,319	32,941
<b>Daerah Utara</b>	<b>35,947</b>	<b>39,892</b>	<b>44,887</b>	<b>52,218</b>	<b>58,974</b>	<b>64,838</b>	<b>70,795</b>	<b>76,913</b>
Kota Denpasar	22,664	25,819	29,389	34,210	38,424	42,384	46,836	51,411
Kab. Badung	23,508	27,201	31,790	37,273	42,429	47,208	52,344	57,799
Kab. Gianyar	12,139	13,605	15,368	17,909	20,140	22,113	24,224	26,488
Kab. Tabanan	10,354	11,470	12,967	15,066	16,996	18,630	20,377	22,139
<b>Daerah Selatan</b>	<b>68,665</b>	<b>78,095</b>	<b>89,514</b>	<b>104,458</b>	<b>117,990</b>	<b>130,336</b>	<b>143,780</b>	<b>157,837</b>

## Lampiran 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Daerah

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (Persen %)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Jember	5,89	6,11	5,69	6,05	6,19	5,96	5,28	5,59
Kab. Klungkung	6,11	6,25	6,05	5,98	6,11	6,28	5,32	5,50
Kab. Bangli	6,14	6,20	5,94	5,83	6,16	6,24	5,31	5,50
Kab. Karangasem	5,43	5,93	6,16	6,01	6,00	5,92	5,06	5,48
Kab. Buleleng	6,44	6,78	7,15	6,96	6,07	6,02	5,38	5,62
<b>Daerah Utara</b>	6	6.25	6.2	6.17	6.11	6.08	5.27	5.54
Kota Denpasar	7,16	7,51	6,96	7,00	6,14	6,51	6,05	6,43
Kab. Badung	7,07	7,64	6,82	6,98	6,24	6,81	6,08	6,74
Kab. Gianyar	7,15	7,08	6,82	6,80	6,30	6,31	5,46	6,03
Kab. Tabanan	6,11	6,12	6,45	6,53	6,19	6,14	5,37	5,73
<b>Daerah Selatan</b>	6.87	7.09	6.76	6.83	6.22	6.44	5.74	6.23

Lampiran 1.3 Perkembangan PDRB per Kapita Menurut Daerah

Kabupaten/Kota	PDRB perkapita (Ribu Rupiah)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Jemberana	23.810	26.194	28.991	33.432	37.548	40.862	44.075	47.516
Kab. Klungkung	23.064	25.435	28.176	32.474	36.575	40.249	43.881	47.464
Kab. Bangli	14.021	15.375	17.179	19.799	22.218	24.384	26.550	28.705
Kab. Karangasem	18.608	20.466	22.985	26.525	29.932	32.645	35.364	38.266
Kab. Buleleng	24.100	26.686	29.992	34.804	38.951	42.593	46.387	50.123
<b>Daerah Utara</b>	20.721	22.831	25.465	29.407	33.045	36.147	39.252	42.415
Kota Denpasar	27.949	31.148	34.730	39.613	43.633	47.235	51.225	55.244
Kab. Badung	41.912	47.305	53.972	61.843	68.833	74.933	81.342	87.987
Kab. Gianyar	25.475	28.272	31.620	36.512	40.679	44.261	48.073	52.131
Kab. Tabanan	24.355	26.812	30.114	34.770	38.991	42.486	46.205	49.918
<b>Daerah Selatan</b>	29.923	33.384	37.609	43.184	48.034	52.229	56.711	61.320

#### Lampiran 1.4 Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Daerah

Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota (Orang)								
Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Jember	146,869	152,066	135,611	142,086	142,434	152,550	162,665	161,024
Kab. Klungkung	92,772	96,527	99,416	100,803	104,130	104,051	103,972	106,035
Kab. Bangli	139,202	141,782	140,122	143,857	135,709	139,134	142,559	146,608
Kab. Karangasem	232,241	238,928	242,195	240,451	241,983	240,363	238,742	253,469
Kab. Buleleng	332,090	348,514	345,423	333,594	345,326	351,717	358,107	371,368
<b>Daerah Utara</b>	943,174	977,817	962,767	960,791	969,582	987,814	1,006,045	1,038,504
Kota Denpasar	411,120	426,602	429,844	461,135	468,515	485,212	501,909	516,642
Kab. Badung	302,822	319,930	325,012	322,913	338,816	341,023	343,229	357,451
Kab. Gianyar	258,004	266,747	262,409	265,787	283,779	292,075	300,370	306,437
Kab. Tabanan	244,038	261,379	262,044	262,006	264,113	255,434	246,754	271,836
<b>Daerah Selatan</b>	1,215,984	1,274,658	1,279,309	1,311,841	1,355,223	1,373,743	1,392,262	1,452,366

## Lampiran 1.5 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Daerah

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Jembrana	7,23	7,25	7,27	7,30	7,54	7,59	7,62	7,95
Kab. Klungkung	6,68	6,81	6,88	6,90	6,98	7,06	7,46	7,75
Kab. Bangli	5,97	6,01	6,35	6,38	6,41	6,44	6,80	7,13
Kab. Karangasem	4,60	5,22	5,34	5,39	5,42	5,48	5,52	5,97
Kab. Buleleng	6,39	6,51	6,63	6,66	6,77	6,85	7,03	7,04
Daerah Utara	6.17	6.36	6.49	6.52	6.62	6.68	6.88	7.16
Kota Denpasar	10,59	10,82	10,90	10,96	11,02	11,14	11,15	11,16
Kab. Badung	8,96	9,07	9,18	9,29	9,44	9,90	9,99	10,06
Kab. Gianyar	7,73	7,99	8,24	8,28	8,49	8,86	8,87	8,92
Kab. Tabanan	7,68	7,76	7,83	7,91	8,07	8,10	8,43	8,64
Daerah Selatan	8.74	8.91	9.0375	9.11	9.255	9.5	9.61	9.695
<b>Provinsi Bali</b>	<b>7,77</b>	<b>8,05</b>	<b>8,10</b>	<b>8,11</b>	<b>8,26</b>	<b>8,36</b>	<b>8,55</b>	<b>8,65</b>

**Lampiran 1.6 Penanaman Modal Menurut Daerah**

Kabupaten/Kota	Realisasi Penanaman Modal Asing (Juta Rupiah)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Jember	10,829	1,860	1,395	7,924	-	2,413,195	1,501	-
Kab. Klungkung	1,001	1,853	4,937	6,231	29,831	150,743	99,656	15,380
Kab. Bangli	2,093	140	140	1,284	-	-	-	-
Kab. Karangasem	590,017	50,035	23,547	60,142	77,609	70,835	170,756	272,339
Kab. Buleleng	2,058,869	70,829	60,483	3,100,222	1,273,715	207,068	3,429	1,758,680
<b>Daerah Utara</b>	<b>2,662,809</b>	<b>124,717</b>	<b>90,502</b>	<b>3,175,803</b>	<b>1,381,155</b>	<b>2,841,841</b>	<b>275,342</b>	<b>2,046,399</b>
Kota Denpasar	188,218	37,693	95,443	184,215	1,702,645	139,373	700,163	32,906
Kab. Badung	1,430,453	4,081,991	3,021,220	959,142	3,362,385	107,353	4,899,094	251,581
Kab. Gianyar	79,848	180,015	95,897	111,853	151,415	-	186,460	6,566
Kab. Tabanan	25,643	54,349	331,912	645,823	267,294	901,409	129,297	1,143
<b>Daerah Selatan</b>	<b>1,724,162</b>	<b>4,354,048</b>	<b>3,544,472</b>	<b>1,901,033</b>	<b>5,483,739</b>	<b>1,148,135</b>	<b>5,915,014</b>	<b>292,196</b>

## Lanjutan Lampiran 1.6

Kabupaten/Kota	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Jemberana	239,990	103,631	80,267	215,646	191,799	4,652,613	274,569	4,409,436
Kab. Klungkung	178,342	53,487	23,954	65,372	118,145	409,229	2,881,329	50,579
Kab. Bangli	26,058	31,479	21,252	23,128	30,780	15,652	26,451	82,586
Kab. Karangasem	45,528	74,664	163,429	78,406	92,344	1,015,270	223,119	5,064,811
Kab. Buleleng	109,615	393,575	201,727	259,707	337,596	212,579	1,122,983	695,011
<b>Daerah Utara</b>	<b>599,533</b>	<b>656,836</b>	<b>490,629</b>	<b>642,259</b>	<b>770,664</b>	<b>6,305,343</b>	<b>4,528,451</b>	<b>10,302,423</b>
Kota Denpasar	2,749,143	2,965,371	2,932,781	1,016,228	14,026,153	27,058	5,666,227	5,105,668
Kab. Badung	1,743,362	3,098,820	3,126,279	1,658,995	2,967,016	517,536	1,011,839	352,413
Kab. Gianyar	1,081,182	150,927	1,134,498	430,417	1,065,721	810,558	525	392,379
Kab. Tabanan	1,141,259	734,409	108,928	98,540	178,116	4,397,145	60,697	140,651
<b>Daerah Selatan</b>	<b>6,714,946</b>	<b>6,949,527</b>	<b>7,302,486</b>	<b>3,204,180</b>	<b>18,237,006</b>	<b>5,752,297</b>	<b>6,739,288</b>	<b>5,991,111</b>

**Lanjutan Lampiran 1.6**

Kabupaten/Kota	PMA + PMDN							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Jembrana	250,819	105,491	81,662	223,570	191,799	7,065,808	276,070	4,409,436
Kab. Klungkung	179,343	55,340	28,891	71,603	147,976	559,972	2,980,985	65,959
Kab. Bangli	28,151	31,619	21,392	24,412	30,780	15,652	26,451	82,586
Kab. Karangasem	635,545	124,699	186,976	138,548	169,953	1,086,105	393,875	5,337,150
Kab. Buleleng	2,168,484	464,404	262,210	3,359,929	1,611,311	419,647	1,126,412	2,453,691
Daerah Utara	3,262,342	781,553	581,131	3,818,062	2,151,819	9,147,184	4,803,793	12,348,822
Kota Denpasar	2,937,361	3,003,064	3,028,224	1,200,443	15,728,798	166,431	6,366,390	5,138,574
Kab. Badung	3,173,815	7,180,811	6,147,499	2,618,137	6,329,401	624,889	5,910,933	603,994
Kab. Gianyar	1,161,030	330,942	1,230,395	542,270	1,217,136	810,558	186,985	398,945
Kab. Tabanan	1,166,902	788,758	440,840	744,363	445,410	5,298,554	189,994	141,794
Daerah Selatan	8,439,108	11,303,575	10,846,958	5,105,213	23,720,745	6,900,432	12,654,302	6,283,307

## Lampiran 1.7 Realisasi Belanja Modal Menurut Daerah

Kabupaten/Kota	Belanja Modal (Juta Rupiah)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Jemberana	67,493	134,613	142,563	161,857	186,025	331,730	241,326	344,652
Kab. Klungkung	49,010	81,223	64,093	99,816	119,947	214,850	188,796	149,850
Kab. Bangli	114,687	82,340	62,762	70,217	110,712	252,493	158,610	181,201
Kab. Karangasem	118,836	171,630	180,737	177,557	178,424	190,438	237,069	144,906
Kab. Buleleng	121,895	79,433	185,896	183,627	226,320	345,148	295,220	204,310
<b>Daerah Utara</b>	471,924	549,242	636,054	693,076	821,430	1,334,659	1,121,024	1,024,922
Kota Denpasar	88,771	206,143	254,008	234,041	192,319	257,668	251,636	258,408
Kab. Badung	199,704	627,705	766,712	949,069	922,772	1,195,120	1,241,111	906,765
Kab. Gianyar	104,130	120,627	185,323	221,586	224,182	309,918	409,360	297,026
Kab. Tabanan	70,442	138,723	128,186	136,344	112,969	257,060	290,565	218,239
<b>Daerah Selatan</b>	463,048,	1,093,199	1,334,230	1,541,042	1,452,243	2,019,766	2,192,674	1,680,441

**Lampiran 1.8 Realisasi Belanja Fungsi Pariwisata Menurut Daerah**

Kabupaten/Kota	Belanja Fungsi Pariwisata (Juta Rupiah)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Jembrana	1,900	2,921	1,871	1,973	6,861	3,687	17,553	18,997
Kab. Klungkung	5,979	9,093	9,251	12,201	9,330	12,115	28,832	25,497
Kab. Bangli	5,586	7,504	9,771	14,144	10,741	36,049	19,251	32,308
Kab. Karangasem	5,669	9,062	14,730	13,749	9,094	18,674	23,415	27,413
Kab. Buleleng	7,129	12,125	14,403	16,003	11,253	20,143	35,135	30,012
<b>Daerah Utara</b>	<b>26,265</b>	<b>40,707</b>	<b>50,029</b>	<b>58,073</b>	<b>47,280</b>	<b>90,670</b>	<b>124,187</b>	<b>134,229</b>
Kota Denpasar	15,889	24,897	28,562	29,304	30,224	47,419	46,665	57,677
Kab. Badung	29,128	40,586	58,596	55,441	29,258	17,472	169,789	259,074
Kab. Gianyar	12,052	14,284	18,493	23,749	19,256	31,44	30,613	36,804
Kab. Tabanan	5,708	9,830	7,240	8,115	5,176	4,980	19,908	22,610
<b>Daerah Selatan</b>	<b>62,779</b>	<b>89,597</b>	<b>112,893</b>	<b>116,611</b>	<b>83,915</b>	<b>101,313</b>	<b>266,977</b>	<b>376,166</b>

## Lampiran 4.1 Indeks Williamson Menurut Daerah

Kabupaten/Kota	Indeks Williamson							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Jember	0.059077	0.05838	0.054916	0.05429	0.054083	0.051777	0.048795	0.047773
Kab. Klungkung	0.036157	0.036428	0.034007	0.033299	0.034094	0.036219	0.03762	0.037963
Kab. Bangli	0.116157	0.117325	0.116895	0.117362	0.117703	0.116883	0.116259	0.116105
Kab. Karangasem	0.049696	0.050476	0.047424	0.047724	0.045857	0.047136	0.04819	0.047579
Kab. Buleleng	0.099757	0.103307	0.108797	0.112329	0.109398	0.109178	0.111291	0.111268
<b>Daerah Utara</b>	0.12561	0.130272	0.133031	0.130672	0.127362	0.12574	0.125955	0.126429
Kota Denpasar	0.039386	0.040097	0.045917	0.049716	0.055175	0.057682	0.058468	0.059987
Kab. Badung	0.199011	0.207906	0.217732	0.216971	0.218175	0.219745	0.220226	0.2212
Kab. Gianyar	0.068055	0.069845	0.072387	0.069998	0.069145	0.068671	0.068347	0.067034
Kab. Tabanan	0.080456	0.084668	0.085276	0.082964	0.079772	0.078672	0.077766	0.077714
<b>Daerah Selatan</b>	0.108114	0.111498	0.113253	0.110683	0.107346	0.105473	0.105138	0.105054

Lampiran 4.2 Data Hasil Uji *Likelihood* Daerah Utara Bali

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	75.552440	(4,26)	0.0000
Cross-section Chi-square	88.744473	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: LY  
Method: Panel Least Squares  
Date: 10/14/20 Time: 20:51  
Sample (adjusted): 2012 2018  
Periods included: 7  
Cross-sections included: 5  
Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.626628	0.754292	-2.156496	0.0392
LNTK	-0.371610	1.926386	-0.192905	0.8483
LNPM	0.017447	0.044195	0.394774	0.6958
LBM	0.292909	0.153075	1.913497	0.0653
LBFP	0.356256	0.080086	4.448415	0.0001
Root MSE	0.363842	R-squared		0.502710
Mean dependent var	0.728570	Adjusted R-squared		0.436405
S.D. dependent var	0.523482	S.E. of regression		0.392994
Akaike info criterion	1.101518	Sum squared resid		4.633324
Schwarz criterion	1.323710	Log likelihood		-14.27656
Hannan-Quinn criter.	1.178219	F-statistic		7.581752
Durbin-Watson stat	0.405943	Prob(F-statistic)		0.000240

Lampiran 4.3 Data Hasil Uji *Hausman* Daerah Utara Bali

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	302.209762	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LNTK	0.365957	-0.371610	0.019527	0.0000
LNPM	0.026652	0.017447	0.000004	0.0000
LBM	-0.205293	0.292909	0.002359	0.0713
LBFP	0.165715	0.356256	0.000982	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LY

Method: Panel Least Squares

Date: 10/14/20 Time: 20:51

Sample (adjusted): 2012 2018

Periods included: 7

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNTK	-0.727436	0.292919	-2.483401	0.0198
LNPM	0.365957	0.598939	0.611009	0.5465
LBM	0.026652	0.013492	1.975325	0.0589
LBFP	-0.205293	0.067091	-3.059926	0.0051
LNTK	0.165715	0.039596	4.185141	0.0003

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.102405	R-squared	0.960606
Mean dependent var	0.728570	Adjusted R-squared	0.948485
S.D. dependent var	0.523482	S.E. of regression	0.118815
Akaike info criterion	-1.205467	Sum squared resid	0.367041
Schwarz criterion	-0.805520	Log likelihood	30.09567
Hannan-Quinn criter.	-1.067406	F-statistic	79.24964
Durbin-Watson stat	1.568652	Prob(F-statistic)	0.000000

## Lampiran 4.4 Hasil Analisis Regresi Model Terpilih Daerah Utara Bali

Dependent Variable: LY  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/14/20 Time: 20:50  
 Sample (adjusted): 2012 2018  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 5  
 Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.727436	0.292919	-2.483401	0.0198
LNTK	0.365957	0.598939	0.611009	0.5465
LNPM	0.026652	0.013492	1.975325	0.0589
LBM	-0.205293	0.067091	-3.059926	0.0051
LBFP	0.165715	0.039596	4.185141	0.0003

## Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.102405	R-squared	0.960606
Mean dependent var	0.728570	Adjusted R-squared	0.948485
S.D. dependent var	0.523482	S.E. of regression	0.118815
Akaike info criterion	-1.205467	Sum squared resid	0.367041
Schwarz criterion	-0.805520	Log likelihood	30.09567
Hannan-Quinn criter.	-1.067406	F-statistic	79.24964
Durbin-Watson stat	1.568652	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 4.5 Data Hasil Uji *Likelihood* Daerah Selatan Bali

## Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	113.691120	(3,20)	0.0000
Cross-section Chi-square	81.013768	3	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LY

Method: Panel Least Squares

Date: 10/15/20 Time: 22:00

Sample (adjusted): 2012 2018

Periods included: 7

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 28

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.364844	2.894144	0.471588	0.6417
LNTK	-1.019187	0.240066	-4.245443	0.0003
LNPM	0.059450	0.043243	1.374801	0.1824
LBM	0.660730	0.075363	8.767310	0.0000
LBFP	-0.088257	0.091918	-0.960169	0.3470
Root MSE	0.237455	R-squared		0.808847
Mean dependent var	-2.416637	Adjusted R-squared		0.775604
S.D. dependent var	0.553081	S.E. of regression		0.261997
Akaike info criterion	0.319466	Sum squared resid		1.578777
Schwarz criterion	0.557360	Log likelihood		0.527478
Hannan-Quinn criter.	0.392192	F-statistic		24.33068
Durbin-Watson stat	0.706990	Prob(F-statistic)		0.000000

## Lampiran 4.6 Hasil Analisis Regresi Model Terpilih Daerah Selatan Bali

Dependent Variable: LY  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/15/20 Time: 21:55  
 Sample (adjusted): 2012 2018  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 4  
 Total panel (balanced) observations: 28

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-14.52048	3.333253	-4.356249	0.0003
LNTK	1.026408	0.274335	3.741448	0.0013
LNPM	0.006882	0.012140	0.566875	0.5771
LBM	-0.081577	0.050614	-1.611764	0.0227
LBFP	0.010907	0.024278	0.449271	0.6581

## Effects Specification

## Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.055885	R-squared	0.989412
Mean dependent var	-2.416637	Adjusted R-squared	0.985706
S.D. dependent var	0.553081	S.E. of regression	0.066125
Akaike info criterion	-2.359597	Sum squared resid	0.087449
Schwarz criterion	-1.978967	Log likelihood	41.03436
Hannan-Quinn criter.	-2.243235	F-statistic	266.9897
Durbin-Watson stat	1.027184	Prob(F-statistic)	0.000000